

LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)
KEMANTREN GANDOMANAN
TAHUN 2024



Disusun oleh:

Kemantren Gondomanan

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GANDOMANAN

Kemantren Gondomanan

Jl. Brigjen Katamso No 93 Yogyakarta Kode Pos: 55121 Telp.(0274)376783 Fax (0274)376783

EMAIL: gm@jogjakota.go.id HOTLINE SMS: 08122780001

HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Kemantren Gondomanan Tahun 2024 dapat tersusun. Dasar Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan dari penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah dalam rangka pertanggungjawaban instansi kepada pemerintah atasan dan kepada masyarakat mengenai kinerjanya. Dengan demikian transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tuntutan di era ekonomi daerah sekarang ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya instansi pemerintah ini diharapkan dapat mengarah pada terwujudnya *Good Governance*.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan peningkatan motivasi kerja bagi Kemantren Gondomanan untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Kami menyadari sepenuhnya bahwa LKIP ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan, maka saran dan kritik sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan.

Yogyakarta, Januari 2025
Mantri Pamong Praja Gondomanan



Gahya Wijayanta, S.Sos
NIP. 19701119 199603 1 003

Ringkasan Eksekutif

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman Peraturan Wali Kota Yogyakarta nomor 22 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, maka Kemantren Gondomanan telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi kepada pemerintah atasan dan kepada masyarakat mengenai kinerjanya.

Sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2024 adalah : Pertama, **nilai perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat**, dan Kedua, **nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat**. Sasaran Pertama dicapai melalui 5 (lima) sasaran antara yaitu : (1) terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten, (2) nilai survei kepuasan masyarakat meningkat, (3) nilai swadaya murni masyarakat meningkat, (4) jumlah pelanggaran Perda menurun, dan (5) terselesaikannya permasalahan sebagai hasil koordinasi; sedangkan sasaran Kedua dicapai dengan 1 (satu) sasaran antara yaitu akuntabilitas kinerja Kemantren Gondomanan meningkat.

Secara umum kinerja Kemantren Gondomanan di tahun 2024 dalam mencapai sasaran yang ditetapkan masuk dalam kriteria Sangat Tinggi (diatas 91%). Sasaran strategis nilai perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat tercapai 369,6 dari target 369 (capaian kinerja 100,16%). Sasaran antara dan capaiannya :

- 1) terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten tercapai 2 (dua) dokumen dari target 2 (dua) dokumen (capaian kinerja 100%)

- 2) nilai survei kepuasan masyarakat tercapai 88,72 dari target 88,70 (capaian kinerja 100,02%);
- 3) angka swadaya masyarakat tercapai Rp1.049.185.000,- dari target Rp1.044.024.000,- (capaian kinerja 100,49%);
- 4) jumlah pelanggaran Perda menurun dari target 130 terjadi 127 kali (capaian kinerja 102,31%);
- 5) prosentase permasalahan yang terselesaikan sebagai hasil koordinasi tercapai 100% dari target 100% (capaian kinerja 100%).

Sedangkan sasaran strategis nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan tercapai nilai A Nilai (89,76) dari target A Nilai atau prosentase capaian 100%, dengan sasaran antara nilai SAKIP tercapai A Nilai (85,52) dengan predikat **Memuaskan** dari target A Nilai atau prosentase capaian 100%.

Kinerja keuangan tahun 2024 Kemantren Gondomanan juga sangat tinggi, dari target anggaran Rp9.354.141.138,- terealisasikan Rp8.922.748.436,- dengan prosentase capaian 95,39%.

Faktor kunci yang menjadi pendorong keberhasilan kinerja Kemantren Gondomanan di tahun 2024 antara lain adalah : ketersediaan anggaran yang semakin memadai; kualitas dan kompetensi SDM yang makin meningkat, efektivitas perencanaan, monitoring dan evaluasi; inovasi sistem dan prosedur pelayanan; pemanfaatan teknologi informasi; dan penerapan sistem *reward and punishment* untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja pegawai. Selain itu dukungan faktor eksternal seperti : peran lembaga sosial kemasyarakatan; partisipasi dan swadaya masyarakat yang tinggi; dan sinergitas antar lembaga dalam Forum Komunikasi Pimpinan kemantren (Forkompimtren) Gondomanan juga sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan keberhasilan pencapaian tujuan.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	4
C. Gambaran Umum Kemantren Gondomanan.....	4
1. Kondisi Wilayah	5
2. Struktur Organisasi	8
3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	9
4. Isu-isu Strategis Organisasi	12
a. Pelayanan Publik	12
b. Pemberdayaan Masyarakat	15
c. Pembangunan Kewilayahan	16
d. Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan.....	17
e. Keterbukaan Informasi Publik	18
f. Reformasi Birokrasi	19
g. Dana Keistimewaan	21
h. Darurat Sampah Akibat Penutupan TPA Piyungan	22
5. Keadaan Pegawai	23
6. Keadaan Sarana Prasarana dan Keuangan	26
D. Sistematika Penyajian	27
BAB II PERENCANAAN KINERJA	29
A. Perencanaan Strategis 2023-2026	29
1. Visi dan Misi Kepala Daerah	30
2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	31

a. Tujuan	31
b. Sasaran Strategis	32
3. Strategi dan Arah Kebijakan	32
a. Kebijakan.....	33
b. Program, Kegiatan dan Subkegiatan	40
B. Perjanjian Kinerja.....	44
C. Rencana Anggaran Tahun 2024.....	45
1. Target Belanja Kemantren Gondomanan	46
2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	46
BAB III AKUNTABILITAS	47
KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	47
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	47
2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya..	57
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.....	61
4. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Standar Nasional/ Organisasi Sejenis	67
5. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis	67
a. Sasaran Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan Meningkatkan	68
b. Sasaran Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan Meningkatkan	77
6. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan atau Peningkatan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan	81
7. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	85
8. Analisis Program Kegiatan yang yang Terkait dengan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan	89

9. Kolaborasi Lintas Sektor yang Mendukung Pencapaian Kinerja	89
B. Realisasi Anggaran	91
1. Penyerapan Anggaran	91
2. Analisis Atas Efisiensi Sumber Daya	95
C. Inovasi dan Prestasi.....	99
1. Inovasi yang Mendukung Pencapaian Kinerja	99
2. Prestasi	103
D. Tindak Lanjut Rekomendasi LKIP Tahun 2023	104
BAB IV PENUTUP	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Rencana Tindak Lanjut.....	107
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Penduduk Kemantren Gondomanan Tahun 2024	6
Tabel I.2 Jumlah RW dan RT Kemantren Gondomanan.....	6
Tabel I.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan, Golongan dan Jenis Kelamin.....	24
Tabel I.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.....	24
Tabel I.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	25
Tabel I.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon.....	25
Tabel II.1 Ringkasan Visi Misi Renstra Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 ...	30
Tabel II.2 Tujuan dan Sasaran kemantren Gondomanan Tahun 2024.....	31
Tabel II.3 Sasaran Strategis Kemantren Gondomanan.....	32
Tabel II.4 Sasaran Strategis, Sasaran Antara, Program, Kegiatan dan subkegiatan Kemantren Gondomanan Tahun 2024	41
Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2024.....	44
Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024.....	45
Tabel II.7 Target Belanja Kemantren Gondomanan APBD Perubahan Tahun 2024.....	46
Tabel II.8 Anggaran Belanja Non Pegawai Per Sasaran Strategis.....	46
Tabel III.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan.....	48
Tabel III.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	48
Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	49
Tabel III.4 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran/ Tujuan.....	49
Tabel III.5 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Program.....	51
Tabel III.6 Data Nilai Swadaya Murni Masyarakat Tahun 2024.....	54
Tabel III.7 Prosentase Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja Keuangan Program Tahun Anggaran 2024.....	56
Tabel III.8 Perbandingan Capaian dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023.....	57
Tabel III.9 Perbandingan Capaian dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2024 dengan tahun-tahun Sebelumnya.....	59

Tabel III.10 Perbandingan Capaian Kinerja Keuangan Program Tahun 2024 dengan tahun-tahun Sebelumnya.....	60
Tabel III.11 Matrik Hasil Kesepakatan Review Target Sasaran Pada Renstra Kemantren Gondomanan Tahun 2023-2026	62
Tabel III.12 Matrik Hasil Kesepakatan Review Target Program Pada Renstra Kemantren Gondomanan Tahun 2023-2026.....	63
Tabel III.13 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama dengan target Renstra.....	65
Tabel III.14 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program dengan target Renstra.....	66
Tabel III.15 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Instansi/Organisasi Sejenis.....	67
Tabel III.16 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Bulan Januari s.d Juni Tahun 2024.....	71
Tabel III.17 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024.....	72
Tabel III.18 Permasalahan yang Dibahas dalam Rapat Koordinasi Forkompimtren Gondomanan Tahun 2024.....	77
Tabel III.19 Matriks Tindak Lanjut Hasil Penilaian Komponen Manajemen Pada Evaluasi Sakip Kemantren Gondomanan Tahun 2023.....	80
Tabel III.20 Anggaran dan Realisasi Belanja Kemantren Gondomanan Tahun 2024.....	92
Tabel III.21 Anggaran dan Realisasi Kegiatan Kemantren Gondomanan Tahun 2024.....	93
Tabel III.22 Data Efisiensi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan Tahun 2024.....	96
Tabel III.23 Rekomendasi Inspektorat terhadap LKIP Tahun 2023 dan Tindaklanjutnya.....	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kemantren Gondomanan	5
Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Kemantren Gondomanan	9
Gambar 3. Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Struktur Organisasi Kemantren Gondomanan
- Lampiran 2 Perencanaan Strategis (Matriks RPD)
- Lampiran 3 Berita Acara Review Renstra Tahun 2023-2026
- Lampiran 4 Pohon Kinerja Kemantren Gondomanan
- Lampiran 5 Matriks Cascading Kemantren Gondomanan_RPD Tahun 2024
- Lampiran 6 Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Lampiran 7 Rencana Aksi Kemantren Gondomanan Tahun 2024
- Lampiran 8 Tabel I.8 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kemantren Gondomanan Tahun 2024
- Lampiran 9 Daftar Nominatif Pegawai Kemantren Gondomanan Tahun 2024
- Lampiran 10 Metadata RPD Kemantren 2023-2026
- Lampiran 11 Tabel I.7 Data Sarana dan Prasarana Kemantren Gondomanan
- Lampiran 12 Laporan Realisasi fisik dan Keuangan kemantren Gondomanan
- Lampiran 13 Berita Acara Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kelurahan se Kemantren Gondomanan Tahun 2024
- Lampiran 14 Rekapitulasi Laporan Swadaya Murni Kelurahan Tahun 2024
- Lampiran 15 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
- Lampiran 16 Berita Acara Forum OPD Kemantren Gondomanan untuk Renja 2024
- Lampiran 17 Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi
- Lampiran 18 LHE AKIP Internal 2023
- Lampiran 19 SK Tim Penyusunan LAKIP 2024
- Lampiran 20 Matriks Tindak Lanjut Evaluasi LHE SAKIP Tahun 2023

- Lampiran 21 Rekapitulasi Realisasi Program Kegiatan tahun 2024
- Lampiran 22 SK Pembentukan Tim Kerja kemantren Gondomanan Tahun 2024
- Lampiran 23 Berita Acara Forum OPD Kemantren Gondomanan Tahun 2024
- Lampiran 24 SK pemberian Piagam Penghargaan untuk Pegawai berprestasi
- Lampiran 25 Berita Acara Desk Realisasi Renja Tribulanan Tahun 2024
- Lampiran 26 Matrik Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024
- Lampiran 27 Notulensi Rapat-rapat tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuntutan transparansi atau keterbukaan dalam pemerintahan menjadi hal yang penting dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Oleh karena itu transparansi dipandang menjadi suatu keharusan untuk diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu saja hal itu juga sesuai dengan semangat zaman yang serba terbuka, seiring dengan perkembangan teknologi dan regulasi informasi.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi dan tuntunan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and services* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut "*good governance*" (pemerintahan yang baik). Agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, private sector dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya "*alignment*" (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi, dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan

tersendiri.

Terselenggaranya *good governance* juga merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Instansi pemerintah harus bertanggung jawab (*accountable*) dan melaporkan kinerjanya kepada pihak yang memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dilaksanakan setiap tahun sebagai upaya untuk mewujudkan suatu instansi pemerintah yang senantiasa memperbaiki kinerjanya secara terus menerus dan berkelanjutan.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun sebagai manifestasi dari evaluasi semua rangkaian kinerja dan kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yang selain sebagai bahan evaluasi capaian dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
 4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
 5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2023-2026;
 6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
 7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
 8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;
 9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta.
 12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

B. Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kemantren Gondomanan ini adalah:

1. Memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kemantren Gondomanan secara jelas, transparan dan akuntabel.
2. Wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran selama tahun anggaran 2024 yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kemantren Gondomanan ini adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai pada tahun 2024;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya; dan
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kemantren Gondomanan dalam penerapan azas profesional, transparan dan akuntabel.

C. Gambaran Umum Kemantren Gondomanan

Kemantren Gondomanan merupakan salah satu kemantren di Kota Yogyakarta dengan luas 112.00 Ha dan terdiri dari 2 (dua) kelurahan yaitu Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Prawirodirjan. Jumlah penduduk Kemantren Gondomanan pada akhir tahun 2024 adalah sebesar 14,684

jiwa terdiri atas 7.096 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 7.588 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan. Dengan luas dan jumlah penduduk tersebut maka tingkat kepadatan penduduk Kemantren Gondomanan menjadi 13.110 jiwa/km².

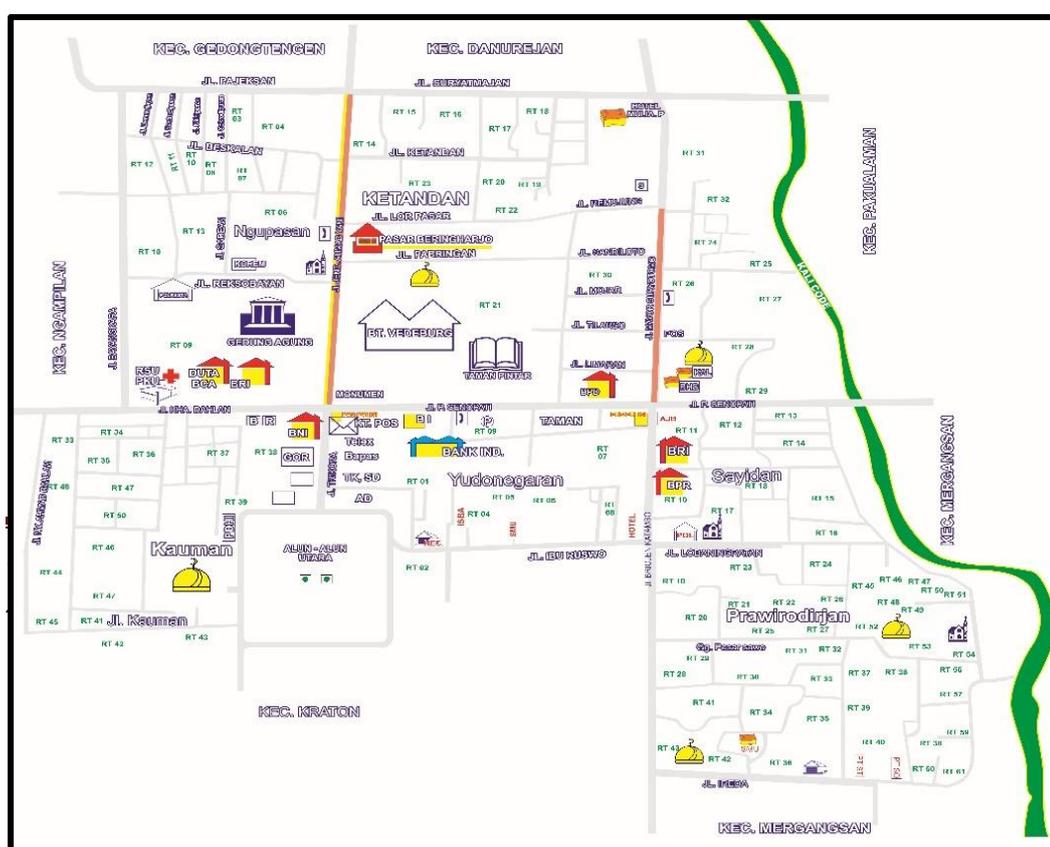
Secara geografis posisi Kemantren Gondomanan berada di jantung Kota Yogyakarta, menjadi pusat perekonomian Yogyakarta yang terkenal dengan kawasan Malioboro, Pasar Beringharjo, Alun-alun Utara dan Titik Nol Kilometer. Gondomanan juga masih memiliki gedung-gedung peninggalan sejarah bangunan cagar budaya seperti Benteng Vredenburg, Gedung Agung/Istana Negara, Bank Indonesia, Kantor Pos, Bank BNI, Masjid Gedhe Kauman dan Gedung Societet Militer/Taman Budaya.

1. Kondisi Wilayah

Wilayah Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta terletak pada ketinggian 113 meter diatas permukaan laut, dilintasi oleh Sungai Code, dengan luas wilayah 1,12 kilometer persegi yang berbatasan dengan :

- Sebelah Barat : Kemantren Ngampilan
- Sebelah Timur : Kemantren Pakualaman
- Sebelah Selatan : Kemantren Kraton
- Sebelah Utara : Kemantren Gedongtengen, Kemantren Danurejan

Gambar 1. Peta Kemantren Gondomanan



Sebagai daerah perkotaan yang padat dan menjadi subyek pariwisata, sebagian penduduk Kemantren Gondomanan bekerja di sektor perdagangan dan jasa. Jumlah penduduk Kemantren Gondomanan pada akhir tahun 2024 sebanyak 14.684 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki 7.096 jiwa dan perempuan 7.588 jiwa.

Tabel I.1

Jumlah Penduduk Kemantren Gondomanan Tahun 2024

Kelurahan	Luas km2	Jumlah Penduduk		Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Prawirodirjan	0,45	4.415	4.679	20.209
Ngupasan	0,67	2.681	2.909	8.343
Jumlah	1,12	7.096	7.588	13.110

Sumber : Data Monografi Kemantren Gondomanan Tahun 2024)

Kemantren Gondomanan juga terbagi menjadi sejumlah kampung, RW dan RT di Kemantren Gondomanan sebagai berikut :

Tabel I.2

Jumlah RW dan RT Kemantren Gondomanan

Kelurahan	Jumlah Perangkat Kelurahan	Jumlah Kampung	Jumlah RW	Jumlah RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Prawirodirjan	8	3	18	61
Ngupasan	8	4	13	49
Jumlah	16	7	31	110

Sumber : Data Monografi Kemantren Gondomanan Tahun 2024)

Selain lembaga-lembaga tersebut diatas juga terdapat kelembagaan masyarakat dan sosial lainnya baik di tingkat Kemantren maupun Kelurahan, diantaranya:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Ngupasan dan Prawirodirjan.
- b. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Ngupasan dan Prawirodirjan.
- c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Kemantren dan Kelurahan, Kelompok PKK RW, Kelompok PKK RT dan Dasawisma.
- d. Ketua Kampung (ada 7 kampung yaitu : Ngupasan, Ketandan, Ratmakan, Kauman, Yudonegaran, Sayidan, Prawirodirjan).
- e. Lembaga-lembaga kemasyarakatan baik di tingkat Kemantren maupun Kelurahan antara lain :
 - Karang Taruna Kemantren dan Kelurahan;
 - Kecamatan Sehat, Kelurahan Siaga;
 - Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM);
 - Forum Komunikasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
 - Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP UKS);
 - Paguyuban Kesenian;
 - Paguyuban Lansia;
 - Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD di tingkat Kemantren dan Kelurahan;
 - Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis);
 - Kampung KB;
 - Kampung Ramah Anak, Kelurahan Ramah Anak; dan Kemantren Layak Anak;
 - Kampung Panca Tertib;
 - Kampung Wisata;
 - Kampung Tangguh Bencana (KTB);
 - Gapoktan dan Forum Gapoktan;

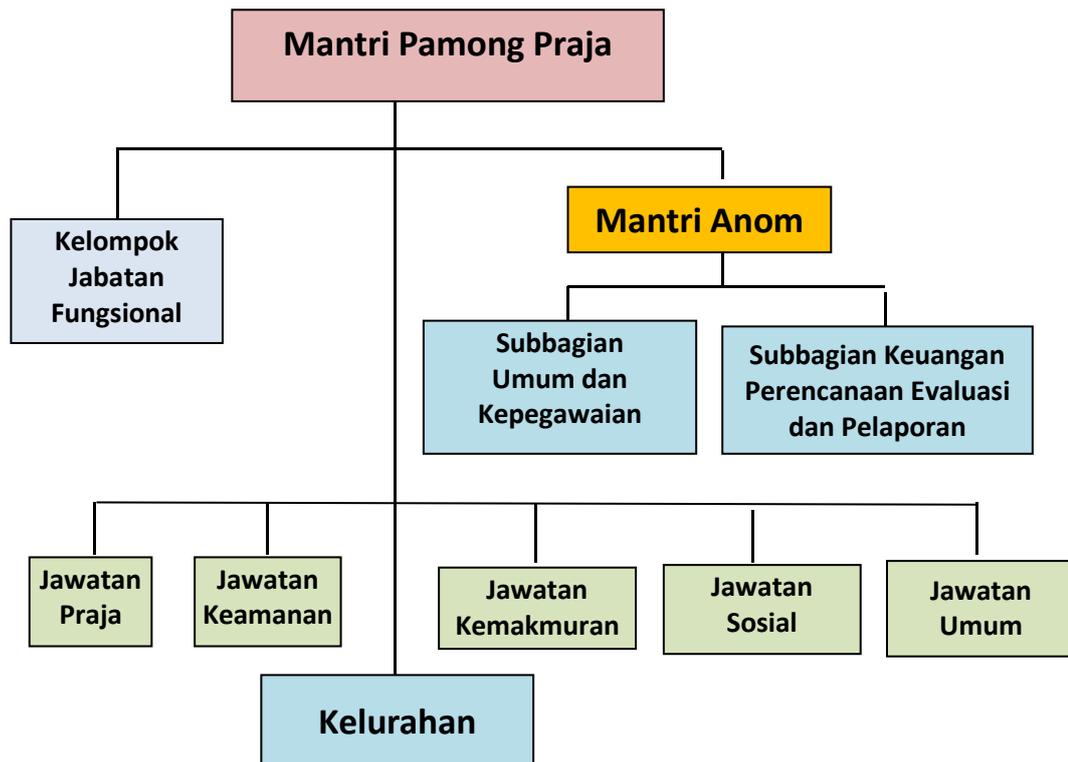
- Kampung Proklim;
- KONI Korman Gondomanan;
- Forum Kemantren Inklusi Gondomanan;
- Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
- Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
- Forum Bank Sampah Kemantren dan Kelurahan;
- Jaga Warga; dan
- Tim Pembina Jam Belajar Masyarakat (JBM).

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020, Kemantren Gondomanan terdiri dari 2(dua) kelurahan yaitu Kelurahan Ngupaan dan Kelurahan Prawirodirjan. Dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta, Susunan Organisasi Kemantren Gondomanan adalah terdiri dari :

- a. Mantri Pamong Praja;
- b. Sekretariat yang dipimpin oleh Mantri Anom terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Umum; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Kemantren Gondomanan



3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pembentukan organisasi Kemantren di Wilayah Kota Yogyakarta tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kecamatan/kemantren menjadi salah satu perangkat daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan

Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta pada Pasal 2 disebutkan bahwa :

- a. Kemantren adalah sebutan Kemantren di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari Daerah Kota Yogyakarta,
- b. Kemantren dipimpin oleh seorang Mantri Pamong Praja yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya pada Pasal 4 disebutkan bahwa Kemantren mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan di wilayah masing-masing.

Sedangkan fungsi kemantren sebagaimana tersebut pada Pasal 5 adalah sebagai berikut :

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;
- b. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;
- c. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;
- d. penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
- e. penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren;
- f. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;

- g. penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;
- i. penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren;
- j. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- l. pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota;
- m. pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;
- n. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;
- o. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;
- p. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
- q. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
- r. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- s. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren; dan,
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

Selain melaksanakan fungsi tersebut diatas, kemantren di Kota Yogyakarta juga melaksanakan pelimpahan kewenangan dari

Walikota Yogyakarta dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2023) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja. Walikota melimpahkan sebagian kewenangan urusan pemerintahan kepada Mantri Pamong Praja meliputi 14 aspek yaitu :

1. Pemerintahan Umum;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Pekerjaan Umum dan Penataan ruang;
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
6. Sosial;
7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Pertanahan;
9. Lingkungan Hidup;
10. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
12. Perhubungan;
13. Kebudayaan; dan
14. Perdagangan.

4. Isu-isu Strategis Organisasi

a. Pelayanan Publik

Kemantren merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat, sehingga citra pelayanan publik yang diberikan oleh kemantren kepada masyarakat mencerminkan pula citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya. Oleh karena itu maka perbaikan dalam sistem pelayanan di tingkat kemantren menjadi hal yang harus terus menerus dilakukan.

Dalam rangka optimalisasi peran strategis pelayanan

kemantren untuk mendukung tatakelola pemerintahan yang baik sejalan dengan apa yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengatur pula azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

- 1) kepentingan umum;
- 2) kepastian hukum;
- 3) kesamaan hak;
- 4) keseimbangan hak dan kewajiban;
- 5) profesionalisme;
- 6) partisipatif;
- 7) persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- 8) keterbukaan;
- 9) akuntabilitas;
- 10) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- 11) ketepatan waktu; dan
- 12) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kemantren (PATEN), peran dan fungsi kemantren sebagai pusat pelayanan masyarakat makin diteguhkan dan pada tanggal 12 Desember 2012 PATEN di kemantren se Kota Yogyakarta diresmikan oleh Walikota Yogyakarta. Hal itu menunjukkan tekad dan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas kemantren dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) yang dalam proses penyusunannya melibatkan unsur masyarakat melalui mekanisme Forum Konsultasi Publik (FKP).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 5 disebutkan bahwa kecamatan (kemantren) sebagai penyelenggara PATEN harus memiliki persyaratan substantif, administratif dan teknis. Secara substantif Mantri Pamong Praja telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja, yang mencakup pula kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan aparatur birokrasi di tingkat kemantren.

Kemantren merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di Kemantren Gondomanan telah dilengkapi dengan gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga mendukung dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Kemantren Gondomanan juga telah melakukan perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana kerja

antara lain perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, pembelian alat kantor, perbaikan gedung kantor kemantren dan kelurahan.

Untuk mengukur kinerja aparatur Kemantren Gondomanan dalam memberikan pelayanan publik, sekaligus untuk mengetahui kebutuhan dan harapan masyarakat maka dilakukan survei kepuasan masyarakat (SKM). Pengukuran SKM dilaksanakan sebanyak dua kali dalam setahun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat. Hasil pengukuran SKM merupakan indikator kinerja program dan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kemantren Gondomanan.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah upaya untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan dan pengawasan. Pengambilan kebijakan kemantren dimulai dari proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sejak dari tingkat kampung, tingkat kelurahan dan kemantren yang melibatkan representasi unsur-unsur dalam masyarakat. Perencanaan pada sisi ini merupakan hasil dari masukan masyarakat (*bottom up planning*) melalui musyawarah pembangunan. Namun sejalan dengan pelimpahan kewenangan yang begitu dinamis maka beberapa aspek perencanaan juga bersifat *given* atau ditetapkan oleh pemerintah tingkat atasnya baik Pemerintah Kota, Provinsi maupun Pemerintah Pusat melalui dinas-dinas/instansi terkait. Sehingga proses perencanaan *bottom up planning* harus dipadukan dengan perencanaan yang bersifat *topdown*.

Pemberdayaan masyarakat pada tataran kemantren dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik yang menjadi kewenangan Mantri Pamong Praja dan Lurah sesuai dengan peraturan walikota tentang pelimpahan kewenangan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kemantren dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas kader masyarakat atau kelompok masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini direncanakan oleh masyarakat, sasaran, penerima manfaat dan pelaksanaanya juga dari masyarakat, hingga pengawasan monitoring dan evaluasi pun selalu melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Kinerja program pemberdayaan masyarakat diukur dari angka Swadaya murni masyarakat yang dilaporkan oleh kelurahan.

c. Pembangunan Kewilayahan

Pelaksanaan pembangunan wilayah yang bersifat kegiatan pembangunan fisik harus mengacu pada peraturan walikota yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kemantren disamping kesesuaian dengan kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pembangunan wilayah berkorelasi dengan tingkat perkembangan pembangunan kelurahan/kemantren. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan bahwa untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan desa dan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kelurahan melalui pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah

dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Untuk mendapatkan hasil evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, diperlukan instrumen sebagai alat ukur perkembangan Desa dan kelurahan.

Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan. Tingkat perkembangan Desa dan kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil dari Desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemerintah Desa dan kelurahan.

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, meliputi pemantauan dan penilaian tingkat perkembangan desa dan kelurahan. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud berupa evaluasi bidang pemerintahan, evaluasi bidang kewilayahan, dan evaluasi bidang kemasyarakatan.

d. Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan

Perspektif pengarusutamaan gender menjadi pertimbangan dan harus selalu diintegrasikan dalam kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kemantren tetap responsif dan sensitif terhadap kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok

rentan 5 (lima) afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus melibatkan 5 (lima) kelompok afirmatif gender mulai dari proses perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan sebagaimana yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya, sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Kemantren Gondomanan. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja.

Afirmasi gender dalam program/kegiatan diterapkan mulai dari tahapan perencanaan melalui penyusunan dokumen *GAP/GBS (Gender Affirmative Program/Gender Budget Statements)* pada setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

e. Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik. Meskipun demikian, sebagian informasi publik mungkin tidak dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan

sehingga tidak dapat diakses oleh publik sebagaimana informasi yang lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka di setiap badan publik dibentuk Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID). Penunjukan PPID di Kota Yogyakarta ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 207 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta. Untuk menilai kinerja PPID maka setiap tahun dilakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi oleh Komisi Informasi Daerah, yang menunjukkan seberapa informatif kah suatu badan publik.

f. Reformasi Birokrasi

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka pada pidato kenegaraan dalam rangka memperingati ulang tahun ke-64 Kemerdekaan RI di depan Sidang DPR RI tanggal 14 Agustus 2009, Presiden RI menegaskan kembali tekad pemerintah untuk melaksanakan reformasi gelombang kedua. reformasi birokrasi

bermakna perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia, sebuah pertarungan besar bagi bangsa Indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke-21.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka ditetapkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 239 Tahun 2023 tentang Penetapan Roadmap Reformasi Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 di Pemerintah Kota Yogyakarta dan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 291 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023, yang menjadi pedoman arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi tersebut terdapat perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang meliputi Reformasi Birokrasi General (8 area perubahan) dan Reformasi Birokrasi Tematik. Tingkatan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat Makro berupa kebijakan penerapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; di tingkat Meso berupa pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik dengan penetapan perangkat daerah/unit kerja sebagai penanggung jawab/*leading sector* area perubahan tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta; dan di tingkat Mikro berupa pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik pada perangkat daerah/unit kerja yang selaras dengan roadmap Pemerintah Kota Yogyakarta.

Salah satu catatan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kementerian PAN dan RB terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Yogyakarta tahun 2020 adalah bahwa penerapan reformasi birokrasi belum merata pada seluruh Perangkat Daerah/unit kerja Pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya pada Perangkat Daerah/unit kerja yang tidak terpilih dalam pengisian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Untuk itu direkomendasikan agar memperluas pelaksanaan reformasi birokrasi dengan mewajibkan seluruh Perangkat Daerah/unit kerja menyampaikan laporan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi melalui aplikasi PMPRB secara tepat waktu. Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti dengan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah/unit kerja dan mewajibkan seluruh Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi. Selanjutnya untuk lebih mengoptimalkan dan memotivasi pelaksanaan reformasi birokrasi maka nilai indeks pelaksanaan RB ditetapkan sebagai salah satu indikator kinerja utama setiap perangkat daerah.

g. Dana Keistimewaan

Sejalan dengan bergulirnya pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan daerah Istimewa Yogyakarta yang telah bergulir selama satu dasawarsa maka institusi kemantren/kelurahan selain mengalami sejumlah perubahan nomenklatur kelembagaan, tugas pokok dan fungsi, juga mulai terlibat dalam pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari anggaran dana keistimewaan. Keterlibatan kemantren/kelurahan dalam program/kegiatan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan. Tantangan yang dihadapi kemantren/kelurahan dalam situasi ini salah satunya adalah kurangnya personil baik secara kuantitas maupun kualitas

(kompetensi) untuk menangani tugas tambahan terkait dana keistimewaan ini.

h. Darurat Sampah Akibat Penutupan TPA Piyungan

Keterbatasan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan yang mencapai puncaknya pada awal tahun 2023 mengakibatkan terjadinya darurat sampah. Dengan adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mulai tanggal 23 Juli sampai 5 September 2023 TPA Piyungan ditutup. Dengan penutupan TPA tersebut kabupaten/kota yang membuang sampahnya ke TPA Piyungan diharuskan mencari solusi untuk mengelola sampah masing-masing. Upaya yang dilakukan dimulai dari sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola sampah sendiri, Gerakan Zero Sampah Anorganik, mengaktifkan dan memfasilitasi kegiatan bank sampah, dan upaya-upaya lain yang bertujuan untuk mengurangi sampah di tingkat rumah tangga diantaranya :

- a. Sosialisasi Mbah Dirjo (membuang sampah mandiri ala jogja) resik di tiap-tiap RW dengan membuat biopori untuk sampah organik, pengaktifan kembali bank sampah yang tidak aktif,
- b. Pembuatan LOSIDA (Lodong Sisa Dapur).
- c. Pelatihan pengelolaan sampah mandiri.
- d. Pembuatan Ecoenzyme untuk sampah organik

Disamping upaya mereduksi dan mengolah sampah, sulitnya warga untuk membuang sampah mengakibatkan timbulnya tumpukan sampah liar di berbagai titik yang mengakibatkan polusi lingkungan dan merusak keindahan kota. Untuk mengatasinya maka dilakukan patroli terpadu Forkompimtren Gondomanan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta terhadap pembuangan sampah liar sekaligus penindakan terhadap warga yang tertangkap tangan melakukan pembuangan sampah tidak pada tempatnya.

5. Keadaan Pegawai

Penerapan dan penugasan pegawai di Kemantren Gondomanan berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 242 Tahun 2023 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Kemantren dan Kelurahan. Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai di Kemantren Gondomanan sampai dengan akhir tahun 2024 terdiri atas PNS 28 orang, PPPK 2 orang, Naban 2 orang dan PTT 7 orang. Pada awal triwulan 2 tahun 2024 di kemantren Gondomanan mendapatkan penambahan 2 orang ASN dengan status PPPK yang ditugaskan di sekretariat untuk mengisi formasi jabatan 1 (satu) orang sebagai Pranata Komputer Terampil di Sub Bag Umum dan Kepegawaian dan 1 (satu) orang sebagai Perencana Ahli Pertama di Sub Bag Keuangan perencanaan Evaluasi dan Pelaporan. Total jumlah pegawai (ASN dan Naban/TT) Kemantren Gondomanan adalah 39 orang, dari jumlah formasi sesuai hasil analisis jabatan sebanyak 50 orang, sehingga kebutuhan pegawai baru terpenuhi 78% atau terdapat kekurangan 11 orang. Satu jabatan struktural Lurah belum terisi, dan masih ada beberapa jabatan fungsional umum yang belum terpenuhi. Agar kinerja organisasi dapat terus berjalan optimal maka beberapa jabatan fungsional umum kemudian dipenuhi dengan cara *outsourcing* atau pengadaan kontrak kerja dengan penyedia jasa orang perseorangan (tenaga teknis) sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk data pegawai selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.3
Jumlah Pegawai Kemantren Gondomanan Berdasarkan Jabatan, Golongan dan Jenis Kelamin

NO	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mantri Pamong Praja	1	-	-	-	-	1	1
2.	Mantri Anom	1	-	-	-	-	1	1
3.	Kepala Jawatan	2	3	-	-	4	1	5
4.	Kasubbag	1	1	-	-	2	-	2
5.	JFU Kemantren	1	7	-	4	4	-	8
7.	Lurah	1	-	-	-	1	-	1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.	Sekretaris Kel.	-	2	-	-	2	-	2
9.	Kasi Kelurahan	2	4	-	-	6	-	6
10.	JFU Kelurahan	-	1	1	-	-	-	1
11.	PPPK	1	1	-	-	-	-	2
12.	Naban	2	-	-	-	-	-	2
13.	Tenaga Teknis	5	2	-	-	-	-	7
	Jumlah	17	22	1	4	19	3	39

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2024

Data Diklat Struktural/penjenjangan bagi pejabat struktural:

Tabel I.4
Jumlah pegawai berdasarkan jenis Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Diklatpim III/PKA	1	1	0
2	Diklatpim IV/Adum/PKP	10	4	6
4	Pejabat Struktural yang belum mengikuti diklat penjenjangan	6	2	4

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2024

Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.5

Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	S2	2	1	1
2	S1	20	7	13
3	D III	5	1	4
4	SLTA	0	-	0
5	SLTP	1	-	1
6.	SD	0	-	-
	Jumlah	28	9	19

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2024

Jumlah Pegawai Kemantren Gondomanan berdasarkan Eselonering adalah sebagai berikut:

Tabel I.6

Jumlah pegawai berdasarkan eselon

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	III A	1	1	-
2	III B	1	1	0
3	IV A	6	3	3
4	IV B	10	3	7
	Jumlah	18	8	10

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2024

Dari tabel-tabel diatas dapat diketahui bahwa dari aspek kualitas, kompetensi yang dimiliki SDM pegawai Kemantren Gondomanan sudah cukup memadai, meskipun secara kuantitas masih belum mencukupi.

6. Keadaan Sarana Prasarana dan Keuangan

Dalam melaksanakan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu instansi. Berikut ini kami sampaikan keadaan sarana prasarana berupa barang-barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas Instansi Kemantren Gondomanan sebagaimana terlampir pada tabel I.7 (Data Sarana dan Prasarana Kemantren Gondomanan tahun 2024).

Untuk melaksanakan semua kegiatan berbasis kinerja secara optimal, maka diperlukan dukungan anggaran yang terinci sesuai jenis penggunaannya. Dukungan anggaran bagi Kemantren Gondomanan sebagaimana terlampir pada tabel I.8 (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kemantren Gondomanan Tahun 2024).

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan pada tahun 2024 berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2024 Kemantren Gondomanan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp9.354.141.138,- dengan rincian belanja Pegawai sebesar Rp4.532.986.000,- dan belanja Non Pegawai sebesar Rp4.821.155.138,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja Non Pegawai yang berasal dari APBD sebesar Rp4.821.155.138,- yang didukung oleh 6 (enam) program, 17 Kegiatan dan 49 (empatpuluh sembilan) subkegiatan. Alokasi anggaran tersebut meliputi:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp. 4.532.986.000,- |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp. 3.919.899.138,- |
| c. Belanja Hibah | Rp. 648.006.000,- |
| d. Belanja Modal | Rp. 253.250.000,- |

D. Sistematika Penyajian

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Penjelasan Umum Organisasi (Struktur Organisasi, Fungsi dan Tugas, Isu Strategis), Keadaan Sumber daya (keadaan pegawai, Keadaan Sarana dan Prasarana, Keuangan) dan Sistematika LKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi Perencanaan Strategis (Visi Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Strategi, Program dan Kegiatan), Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2024 (Target Belanja Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi :

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 2024

1. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/ sejenis;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
7. Analisis Program/Kegiatan terkait dengan Pengarus Utamaan Gender yang menyasar 5 kelompok rentan, yaitu: fakir miskin, disabilitas, anak, perempuan dan/atau lansia;

8. Inovasi yang mendukung pencapaian kinerja;
9. Kolaborasi lintas sektor yang mendukung pencapaian kinerja.

B. REALISASI ANGGARAN 2024 :

Realisasi anggaran yang dipergunakan untuk mencapai kinerja sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2024

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan, Rencana Tindak Lanjut, dan pemanfaatan laporan kinerja oleh pimpinan Perangkat Daerah sebagai feedback dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat tahun) terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Penjabaran akan visi Kota Yogyakarta Sebagai Kota pendidikan berkualitas, pariwisata berbasis budaya dan pusat pelayanan jasa, yang berwawasan lingkungan akan diimplementasikan dalam serangkaian misi, tujuan, sasaran serta indikator kinerja yang dicapai melalui program pembangunan yang memerlukan strategi dan arah kebijakan Pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu empat tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Kemantren Gondomanan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Kemantren Gondomanan Tahun 2023-2026 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Renstra Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta merupakan manifestasi komitmen Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 tidak terlepas dari keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2017-2022).

1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi dan Misi Kepala Daerah dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPD Kota Yogyakarta 2023-2026 sebagai berikut:

Tabel II.1
Ringkasan Visi Misi Renstra Kota Yogyakarta Tahun 2023 – 2026

VISI	MISI	SASARAN DAERAH
Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berwawasan Lingkungan.	1. Mempertahankan Predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan.
	2. Mempertahankan Predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan.	Meningkatnya Kualitas Pariwisata.
	3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa.	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi 2. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat.
	4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan.	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.
	5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat
	6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance, tata kelola pemerintahan, clean government, pemerintah yang bersih, berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum.	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan
	7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, Bersatu dan damai.	Menurunnya gangguan ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
	8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas.	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur wilayah
	9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Sumber : RPJMD Kota Yogyakarta 2023-2026

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Kemantren Gondomanan mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu :

1. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat.
2. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.

2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kemantren Gondomanan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kemantren.

Tujuan dari Visi dan Misi Kemantren Gondomanan yaitu :

- 1) ***Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan.***
- 2) ***Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan.***

Dengan uraian indikator sebagai berikut :

Tabel II.2
Tujuan dan Sasaran Kemantren Gondomanan Tahun 2024

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET 2024
Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan	Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan	369
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

Sumber : Renstra Kemantren Gondomanan 2023-2026

b. Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu empat tahun adalah sebagai berikut:

Tabel II.3

Sasaran Strategis Kemantren Gondomanan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUNAN			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	Nilai evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan	poin	368	369	385	390
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	poin	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai

Sumber : Renstra Kemantren Gondomanan 2023-2026

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi dan menjadi faktor terpenting dalam proses perencanaan stratejik. Cara mencapai tujuan dan sasaran atau strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi dengan memperhatikan sumber daya yang ada di Kemantren Gondomanan serta keadaan masyarakat di wilayah Kemantren Gondomanan, yang meliputi Kebijakan, Program dan Kegiatan.

a. Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep dan asas menjadi suatu garis pelaksanaan dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan ataupun cara bertindak. Kebijakan harus selalu ada dalam kehidupan bernegara. Kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan warga negara, jika dalam suatu negara tidak memiliki kebijakan, maka peraturan yang ada dalam negara pun tidak dapat berjalan secara teratur. Kebijakan juga merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan yang penting pada suatu organisasi. Kebijakan sebagai mekanisme politis, finansial ataupun dalam bentuk apapun. Dalam suatu kebijakan harus selalu dipikirkan matang-matang dalam memiliki suatu keputusan. Jadi pengertian kebijakan merupakan suatu seperangkat keputusan yang diambil oleh para pejabat politik dalam rangka untuk memilih tujuan dan juga cara untuk mencapainya. Kebijakan juga merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta.

Strategi dan Kebijakan Kemantren Gondomanan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan

Strategi :

a) *Meningkatkan keberdayaan masyarakat.*

Kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak untuk ditangani dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan penanggulangan dengan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban

hidup dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan semangat dan nilai-nilai gerakan Segoro Amarto.

Strategi-strategi pengentasan kemiskinan diantaranya :

- Memperbaiki mental masyarakat supaya lebih mandiri dan tidak selalu menggantungkan bantuan dari Pemerintah melalui pelatihan-pelatihan dan motivasi
- Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar seperti tersedianya hotline media sosial (Whatsapp, FB, IG, website) untuk menjawab keluhan/permasalahan warga.
- Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin diikutkan dalam program gandeng-gendong yang menyajikan konsumsi untuk kegiatan rapat-rapat di kemantren dan kelurahan.
- Menciptakan perencanaan pembangunan secara *bottom up* melalui musrenbang.
- Peran serta penduduk yang mampu untuk mengatasi kemiskinan melalui CSR perusahaan diwilayah Gondomanan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya berencana yang dirancang untuk mengubah atau melakukan pembaruan pada suatu komunitas atau masyarakat dari kondisi ketidakberdayaan menjadi berdaya dengan menitikberatkan pada pembinaan potensi dan kemandirian masyarakat yang diharapkan mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam menentukan masa depan mereka, dimana *provider* dari pemerintah dan lembaga *non*

government organization hanya mengambil posisi partisipan, stimulan dan motivator.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri dan sejahtera. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu Pemerintah Kemantren Gondomanan melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kemantren Gondomanan.

Kebijakan lain Kemantren Gondomanan terkait tugas dan fungsinya antara lain adalah :

- 1) Meningkatkan kapasitas kelompok pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan. Melalui pelatihan-pelatihan, pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan hasil musrenbang sesuai dengan pelimpahan kewenangan dari Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023, diharapkan masyarakat akan menjadi semakin berdaya, sehingga perkembangan pembangunan baik fisik maupun non fisik akan meningkat pula.
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta sarana prasarana pengawasan, terkait dengan tugas Kemantren untuk mengupayakan

tersedianya sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang dapat mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kemantren Gondomanan dalam rangka memberikan pelayanan publik sebaik mungkin dengan membuat usulan diklat, pengisian jabatan kosong dan penambahan sarpras untuk kelancaran tugas pegawai.

3) Meningkatkan responsibilitas terhadap pengaduan masyarakat, agar Kemantren Gondomanan mendapat kepercayaan dari masyarakat terutama yang langsung terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya kepercayaan dari masyarakat diharapkan program-program pembangunan kewilayahan akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Segala aduan masyarakat akan ditindaklanjuti sesegera mungkin.

4) Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan/peningkatan pelayanan dan pelayanan publik perizinan dan non perizinan dengan mekanisme, persyaratan, pembiayaan dan waktu penyelesaian yang jelas berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja yang dikembangkan sebagai berikut:

- Meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui website gm@jogjakota.go.id yang mudah diakses;
- Meningkatkan responsivitas terhadap Pengaduan dan Pengawasan Pelayanan;
- Menggunakan hasil pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai umpan balik untuk meningkatkan kualitas layanan;
- Penguatan inovasi dalam pelayanan.

Arah Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat

- Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi kewilayahan (Dokumen Musrenbang, Perencanaan terintegrasi, Dokumen Evaluasi Pembangunan Kelurahan, Profil, Monografi, Data KSJPS, Pronangkis).
- Meningkatkan persentase sarana dan prasarana yang dimanfaatkan.
- Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemberdayaan.
- Meningkatkan partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam proses pembangunan
- Meningkatkan kapasitas anggota lembaga ekonomi diwilayah (forum UMKM, Gapoktan)
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup

b) Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan

- Meningkatkan Fasilitasi terhadap lembaga Vertikal dan Kemasyarakatan diwilayah.

c) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

- Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kemantren Gondomanan dilaksanakan melalui Reformasi Birokrasi dan Tata kelola Pemerintahan. Reformasi birokrasi merupakan strategi untuk menjawab menguatnya desakan publik akan perbaikan kinerja instansi pemerintah dalam penyediaan layanan publik.
- Melaksanakan Pelayanan yang dilimpahkan sesuai dengan ketentuan.
- Memperkuat inovasi dalam pelayanan publik.
- Meningkatkan integrasi perencanaan kewilayahan dengan instansi pengampu tingkat kota.

d) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas operasi ketertiban.
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait (BKO Satuan Polisi Pamong Praja, Satlinmas, Polsek dan Koramil).

2. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan

Strategi : Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Sasaran dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab, efektif, dan efisien, melalui peningkatan efektivitas layanan birokrasi yang responsif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan akan dapat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

Melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan serta Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan rangkaian proses dalam mendorong reformasi birokrasi di Kemantren Gondomanan dan menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik.

Pelaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang menghasilkan kebijakan, fasilitasi, dan evaluasi kebijakan di bidang organisasi yang diharapkan dapat semakin mendorong proses reformasi birokrasi secara signifikan dipadukan dengan meningkatnya sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan program tersebut. Area perubahan

yang dituju meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan antara lain organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pelayanan publik, *mind set* dan *culture set* aparatur dapat terlaksana dengan baik. Hal ini juga menggambarkan upaya mendorong perubahan pola pikir dan budaya kinerja di lingkungan Kemantren Gondomanan, seperti mendorong keterlibatan staf dalam mengembangkan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan serta Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kebijakan yang diambil oleh Kemantren Gondomanan terkait perubahan pola pikir dan budaya kinerja adalah dengan menerapkan *system reward and punishment* untuk pembinaan pegawai yaitu :

- Pemberian Reward bagi pegawai berkinerja terbaik berupa piagam penghargaan dan cinderamata.
- Punishment berupa surat teguran/tindakan bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai.
- Usulan promosi jabatan bagi pegawai berprestasi dan mutasi/demosi bagi pegawai yang melanggar aturan.
- Usulan untuk mengikuti Diklat penjenjangan atau diklat fungsional bagi pegawai.

Arah Kebijakan

- a. Melaksanakan Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala.
- b. Melaksanakan administrasi keuangan perangkat daerah dengan lengkap sesuai tatakala.

- c. Melaksanakan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala.
- d. Melaksanakan Administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala.
- e. Melaksanakan administrasi umum perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala.
- f. Melaksanakan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala.
- g. Melaksanakan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala.
- h. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas baik.

b. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kebijakan yang diambil berkaitan dengan perencanaan strategis Kemantren Gondomanan tertuang di dalam kerangka perencanaan Strategis di Kemantren Gondomanan adalah dengan menetapkan program, kegiatan dan subkegiatan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah atau dalam rangka bekerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Program, kegiatan dan subkegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang didalam kerangka perencanaan Strategis di Kemantren Gondomanan sebagai berikut:

Tabel II.4
Sasaran Strategis, Sasaran Antara, Program, Kegiatan dan
Sub Kegiatan Kemantren Gondomanan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Sasaran Antara	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang strategis Sumbu Filosofis	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	1.Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang strategis Sumbu Filosofis di Kelurahan Ngupasan 2.Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang strategis Sumbu Filosofis di Kelurahan Prawirodirjan
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan
		Angka Swadaya Masyarakat meningkat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Kelurahan 2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel. Ngupasan 3) Pembangunan sarana dan Prasarana Kel. Prawirodirjan 4) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prawirodirjan 5) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngupasan 6) Evaluasi Kelurahan
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kemantren	1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 2) Peningkatan Kesadaran keluarga dalam Peningkatan pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing

					<ul style="list-style-type: none"> 3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 4) Pelatihan keluarga Tanggap Bencana Alam 5) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda menurun	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase permasalahan yang terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
	Nilai Reformasi Birokrasi meningkat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil Penilaian SAKIP Kemantren Gondomanan oleh Inspektorat	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2) Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD 3) Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD 4) Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD 5) Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				<ul style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3) Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadaan Mebel 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2024

Dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas perlu adanya dukungan untuk membangun semangat mencapai tujuan dengan motto "**SATU HATI UNTUK MELAYANI**", mengandung maksud bahwa dalam setiap langkah melaksanakan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi instansi tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban dan aturan namun juga dilandasi dengan hati ikhlas sebagai sebuah ibadah. Dengan berpegang pada motto ini diharapkan dalam melaksanakan kinerja tidak hanya fokus pada target semata namun juga didasari dengan keikhlasan dan berlandaskan pada delapan asas nilai, yakni : Sederhana, Adanya kepastian/kejelasan, Keamanan, Transparansi, Efisien, Ekonomis, Keadilan dan Ketepatan Waktu.

B. Perjanjian Kinerja

Rencana kinerja merupakan hasil dari proses penetapan perencanaan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD. Secara ringkas perencanaan kinerja Kemantren Gondomanan pada tahun 2024 baik program kegiatan maupun besarnya alokasi anggaran dapat dilihat pada penetapan kinerja (perjanjian kinerja) sebagai berikut:

Tabel II.5

Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	369	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	3.281.350.448,-
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat	Hasil penilaian Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan	A nilai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.658.974.190,-
Jumlah				8.940.324.638,-

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2024

Melalui mekanisme perubahan anggaran APBD 2024 maka perjanjian kinerja mengalami perubahan sebagai berikut :

Tabel II.6
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	369	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	3.325.934.448,-
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat	Hasil penilaian Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan	A Nilai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.028.206.690,-
Jumlah				9.354.141.138,-

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2024

C. Rencana Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Kemantren Gondomanan melaksanakan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran murni sebesar Rp8.940.324.638,- dengan rincian Belanja Pegawai Rp4.206.420.000,- dan Belanja Non Pegawai Rp4.733.904.638,-.

Melalui mekanisme perubahan APBD 2024 menjadi Rp9.354.141.138,- dengan rincian Belanja Pegawai Rp4.532.986.000,- dan Belanja Non Pegawai Rp4.821.155.138,-.

1. Target Belanja Kemantren Gondomanan

Target Belanja Kemantren Gondomanan Tahun 2024 ditetapkan sebagai berikut :

Tabel II.7

Target Belanja Kemantren Gondomanan APBD Perubahan 2024

Uraian	Target	Prosentase
Belanja Pegawai	Rp. 4.532.986.000,-	48,50 %
Belanja Non Pegawai	Rp. 4.821.155.138,-	51,50 %
Jumlah	Rp. 9.354.141.138,-	100%

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2024

2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2024 Kemantren Gondomanan yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel II.8

Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Keterangan
1.	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Rp3.325.934.448,-	35,56 %	
2.	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat	Rp6.028.206.690,-	64,44%	Termasuk gaji dan Tunjangan ASN

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Penyelenggaraan Pemerintahan menuju *Good Governance* dalam rangka reformasi birokrasi yang berbasis kinerja bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan tetapi juga berorientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang digunakan untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Akuntabilitas akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kemantren Gondomanan untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, adalah dengan mendorong pengendalian serta evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya, tahun 2024 Kemantren Gondomanan memiliki 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

- 1) Tujuan : Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan;
Sasaran : Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat.
- 2) Tujuan : Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan;
Sasaran : Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat.

Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi secara umum Kemantren Gondomanan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari masing-masing sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel III.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kemantren Gondomanan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target					Sumber data
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Misi 1:		Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat						
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	367	368	369	385	390	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kelurahan
Misi 2:		Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat						
Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan	A	A	A	A	A	Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat

Sumber : Renstra Kemantren Gondomanan 2023-2026

Pengukuran Kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah. Untuk menginterpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Perangkat Daerah digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel VII-C Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Tabel III.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)
1.	≥ 91	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Membandingkan antara target dengan capaian kinerja akan semakin menarik apabila disajikan pula prosentase dari capaian kinerja tersebut. Untuk mencari prosentase capaian kinerja per kegiatan digunakan rumus : ***(realisasi capaian kinerja : target) x 100***. Sedangkan untuk mencari prosentase kualitas dari realisasi capaian kinerja program digunakan rumus: ***(jumlah prosentase capaian kinerja kegiatan: jumlah kegiatan)***.

Tabel III.3
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	Jumlah nilai evaluasi perkembangan pembangunan kelurahan dibagi jumlah kelurahan
2	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2024

Nilai yang didapat kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun berjalan. Capaian kinerja organisasi Kemantren Gondomanan pada Tahun Anggaran 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel III.4
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran/Tujuan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran/Tujuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	369	369,6	100,16
Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan	A Nilai	A Nilai (89,76)	100

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2024

Dilihat dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran strategis "**Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat**" adalah **100,16%** dengan predikat peringkat kinerja **Sangat Tinggi**.

Upaya pencapaian sasaran strategis Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat, didukung dengan 5 (lima) program yaitu :

- 1) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang, dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis sumbu filosofis;
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan indikator kinerja nilai survey kepuasan masyarakat meningkat;
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan indikator kinerja angka swadaya masyarakat meningkat;
- 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan indikator kinerja jumlah pelanggaran Perda menurun, dan;
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator prosentase permasalahan yang terselesaikan sebagai hasil koordinasi.

Sedangkan capaian kinerja sasaran strategis "**Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat**" adalah **89,76 (nilai A)** dari target **A** nilai atau tercapai sebesar 100% dengan predikat peringkat kinerja **Sangat baik**.

Upaya pencapaian sasaran strategis Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat, didukung dengan 1(satu) program yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja Kemantren Gondomanan meningkat.

Selanjutnya capaian kinerja program Kemantren Gondomanan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel perbandingan target dan realisasi indikator program sebagai berikut:

Tabel III.5

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Program Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sasaran 1 : Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan Meningkat					
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	1 kali	1 kali	100%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	88,70	88,72	100,02%
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Murni Masyarakat	Rp 1.044.024.000	Rp 1.049.185.000	100,49%
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran Perda	130	127	102,31%
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase permasalahan yang terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100%	100%	100%
Sasaran 2 : Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan Meningkat					
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Kemantren Gondomanan	A Nilai	85,52 (A Nilai)	100%

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2024

Rumus penghitungan nilai indikator capaian program-program tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Tata Ruang, dengan indikator Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis.

Program ini merupakan serangkaian kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis dengan Keluaran (Output) berupa Pelatihan Pembuatan Kompos melalui

Pengolahan Sampah Organik Skala Rumah Tangga dengan Metode Biopori. Pelatihan ini dilaksanakan di kemantren Gondomanan sebagai upaya menghadapi kondisi darurat sampah di Kota Yogyakarta, yang terdiri dari 2 (dua) Tolok Ukur Kinerja dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelatihan Pembuatan Kompos melalui Pengolahan Sampah Organik Skala Rumah Tangga dengan Metode Biopori di Kelurahan Prawirodirjan; dan
2. Pelatihan Pembuatan Kompos melalui Pengolahan Sampah Organik Skala Rumah Tangga dengan Metode Biopori di Kelurahan Ngupasan.

Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat dalam mengelola sampah organik menjadi kompos yang berkualitas tinggi. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan kompos tersebut sebagai pupuk organik yang dapat mendukung program kemandirian pangan sekaligus melakukan upaya bersama untuk mengurangi volume timbulan sampah organik.

Adapun dengan dilaksanakannya kegiatan ini, dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah organik secara benar dan efektif;
2. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat dalam pembuatan kompos melalui metode biopori.
3. Meningkatkan ketersediaan pupuk organik berkualitas tinggi untuk digunakan dalam pertanian perkotaan dalam rangka mendukung program ketahanan dan kemandirian pangan di Kota Yogyakarta.
4. Mengurangi jumlah sampah organik yang akhirnya dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Target kegiatan ini dinyatakan dalam angka 2(dua) dokumen laporan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis dan seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar

sehingga prosentase capaian kinerja yang diperoleh adalah **100%** dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi**.

- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat, dihitung menggunakan rumus perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat di Pemerintah Kota Yogyakarta. Formulanya adalah :

Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25.

Berdasarkan capaian kinerja program di Tahun Anggaran 2024 pada tabel III.5 di atas maka prosentase capaian kinerja terhadap indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dari target 88,70 tercapai **88,72** prosentase capaian **100,02%** dengan kategori predikat kinerja **dengan predikat Sangat Baik**. Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap layanan Kemantren Gondomanan.

- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Angka Swadaya Masyarakat, diperoleh dari jumlah angka swadaya murni masyarakat di Kelurahan se Kemantren Gondomanan selama setahun.

Sumber data angka swadaya masyarakat adalah laporan nilai swadaya masyarakat kelurahan, yaitu jumlah angka nominal kegiatan yang dibiayai secara swadaya oleh masyarakat. Data nilai swadaya masyarakat kelurahan se Kemantren Gondomanan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.6

Data Nilai Swadaya Murni Masyarakat Tahun 2024

NO	Kelurahan	Nilai swadaya murni tahun 2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Ngupasan	468.535.000
2.	Prawirodirjan	580.650.000
	Total swadaya murni	1.049.185.000
	Target swadaya murni	1.044.024.000
	Persentase capaian	100,49%

Sumber : Laporan Swadaya Murni Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Prawirodirjan, 2024.

Berdasarkan data capaian kinerja program di Tahun Anggaran 2024 pada tabel diatas maka untuk indikator swadaya masyarakat tercapai Rp1.049.185.000,- dari target Rp1.044,024.000,- sehingga prosentase capaian kinerjanya **100,49%** dengan kategori predikat kinerja **Sangat Tinggi**.

- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan indikator penurunan jumlah pelanggaran Perda, dihitung dengan membandingkan jumlah pelanggaran Perda dengan target yang ditetapkan berdasarkan trend jumlah pelanggaran selama 3 (tiga) tahun terakhir. Formula perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan data laporan Jawatan Keamanan diketahui bahwa jumlah pelanggaran Perda yang terjadi di wilayah Kemantren Gondomanan sepanjang tahun 2024 tercatat 127 kali dari target yang ditetapkan 130 kali. Dari formula diatas maka dapat diketahui prosentase capaian kinerja program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tahun Anggaran 2024 adalah **102,31%** dengan kategori capaian kinerja **Sangat Tinggi**.

- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan indikator prosentase permasalahan di bidang pemerintahan umum yang terselesaikan sebagai hasil koordinasi, dihitung dengan

membandingkan jumlah permasalahan yang ada dengan jumlah permasalahan yang terselesaikan. Formula perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah permasalahan yang ada}}{\text{Jumlah permasalahan yang terselesaikan}} \times 100\%$$

Berdasarkan data laporan Jawatan Praja diketahui bahwa semua permasalahan di bidang pemerintahan umum selama tahun 2024 telah dapat diselesaikan sehingga prosentase capaian kinerja program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tahun Anggaran 2024 untuk adalah **100%** dengan kategori capaian kinerja **Sangat Tinggi**.

- f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kemantren Gondomanan.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perangkat daerah merupakan hasil evaluasi Tim Penilai Internal (TPI) tingkat Kota Yogyakarta terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2023 beserta kelengkapan bukti dukung yang dibutuhkan. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Inspektorat Kota Yogyakarta dengan nomor : 700.1.2.1/127/E.AKIP/B/2024 tertanggal 27 Mei 2024, nilai AKIP yang diperoleh Kemantren Gondomanan untuk tahun 2023 adalah sebesar **85,52** atau berada pada predikat **A (memuaskan)**.

Dari target **A** nilai dengan capaian nilai 85,52 dengan predikat **A** maka prosentase capaian yang diperoleh adalah **100%** atau termasuk kategori **Sangat Tinggi**.

Dalam upaya merealisasikan program-program tersebut diatas secara efektif dan efisien maka perlu didukung aspek keuangan. Pada tabel dibawah ini ditunjukkan perbandingan target dan realisasi capaian kinerja keuangan program Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel III.7
 Prosentase Perbandingan antara Target dan Realisasi
 Capaian Kinerja Keuangan Program Tahun Anggaran 2024

No	Program/Kegiatan	Target(Rp)	Realisasi(Rp)	Prosentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	200.000.000	199.653.200	99,83%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	29.003.000	29.003.000	100 %
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2 806 221.448	2.791.360.137	99,47 %
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	217.360.000	217.360.000	100%
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	73.350.000	73.350.000	100%
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.028.206.690	5.611.952.099	93,09%
	Jumlah/rata-rata	9.354.141.138	8.922.748.436	95,39%

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian target kinerja keuangan semua program berada diatas 91% atau masuk kategori capaian **Sangat Tinggi**. Bahkan untuk program kerja yang menjadi substansi dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 yaitu Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mencapai realisasi rata-rata diatas 99%. Kondisi ini secara umum menunjukkan bahwa Kemantren Gondomanan telah menyusun perencanaan kegiatan dan keuangan yang baik dan mampu melaksanakan semua rencana secara efektif dan efisien serta mencapai target yang ditetapkan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya

Tabel berikut menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel III.8

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	368	369	368,3	369,6	100,08	100,16
Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan	Nilai reformasi birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan	A	A	94,44 (AA)	89,76 (A)	100,92	100

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis **“Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat”** tahun 2024 mengalami peningkatan 1.30 point dari capaian tahun sebelumnya, demikian juga prosentase capaian kinerjanya juga meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa tetap ada dinamika dan peningkatan dalam komponen-komponen parameter yang menyusun indikator nilai tingkat perkembangan pembangunan kelurahan/kemantren meskipun dalam skala yang kecil karena dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2023-2024, diantaranya aktivasi kegiatan ekonomi pasca meredanya pandemi Covid19 serta kegiatan pesta demokrasi yang dinikmati dan melibatkan seluruh masyarakat dengan pelaksanaan pemilu nasional untuk memilih presiden/wakil presiden serta DPR/DPRD serta Pilkada yang telah berhasil dilaksanakan secara baik dan lancar pada periode tersebut.

Dari data hasil penilaian tingkat perkembangan pembangunan di level kelurahan maka diketahui bahwa Kelurahan Ngupasan mendapatkan

nilai sedikit lebih tinggi (369,8) daripada Kelurahan Prawirodirjan (369,4). Hal ini disebabkan adanya beberapa perkembangan dan dinamika kegiatan sosial ekonomi masyarakat di kelurahan Ngupasan pada tahun 2024 yang dinilai relatif lebih cepat, terutama dengan kondisi Kelurahan Ngupasan berada sebagai bagian sumbu filosofi sehingga memiliki potensi yang lebih untuk berkegiatan ekonomi bagi warganya, adanya aktivitas kegiatan pelestarian seni budaya lokal Ngupasan, adanya penyelenggaraan Festival Apem (tahunan), pelestarian kuliner lokal Ngupasan (kicak) serta adanya penyelenggaraan Festival Budaya Tionghoa secara rutin setiap tahun sehingga dapat mendorong dan berdampak pada peningkatan aktivitas kegiatan perekonomian masyarakat kelurahan Ngupasan dan sosial budaya masyarakat pada umumnya.

Capaian kinerja sasaran strategis “**Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat**” tahun 2024 mengalami penambahan parameter menjadi 8 unsur yang sebelumnya pada tahun 2023 hanya 5 unsur. Parameter penilaian yang meliputi 8 parameter tersebut antara lain:

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja GM
2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) GM
3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset GM
4. Indeks Kepuasan Masyarakat
5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP
6. IP ASN GM
7. Penilaian Pengawasan arsip internal
8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik

Hasil penilaian Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan oleh Inspektorat dengan 8 parameter yang telah disampaikan oleh Inspektorat dengan surat nomor: 000.8.6.2/2982 tanggal 4 Desember 2024, Kemantren Gondomanan mencapai hasil nilai sebesar 89,76 (dengan kategori A poin) dengan predikat “Sangat Baik” dari target A poin atau tercapai 100%. Hal ini menunjukkan proses internalisasi, pelaksanaan dan pendokumentasian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Kemantren Gondomanan yang baik dan senantiasa diupayakan terus semakin baik. Selain itu, tindak lanjut terhadap catatan dan rekomendasi hasil evaluasi

pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun sebelumnya juga memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian nilai hasil pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi tahun 2024.

Capaian kinerja sasaran strategis yang tinggi tentu tidak dapat dilepaskan dari capaian kinerja program-program yang mendukungnya. Pada tabel berikut memperlihatkan perbandingan capaian target kinerja masing-masing program pada tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel III.9
Perbandingan Capaian dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2024 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

No	Program	Indikator	Target Tahun				Capaian dan Prosentase Realisasi Tahun			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Dokumen pemanfaatan ruang Strategis sumbu filosofis	-	-		2 dok	-	-		2 dok (100%)
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	87,9	87,9	88,62	88,70	88,57 (101%)	88,62 (100,06%)	88,68 (100,068%)	88,72 (100,02%)
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat	469.200.000	478.584.000	1.032.240.000	1.044.024.000	480.256.250 (102%)	515.392.000 (107,69%)	1.039.317.000 (100,686%)	1.049.185.000 (100,49%)
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda	160	157	140	130	145 (109,38%)	152 (103,18%)	136 (102,86%)	127 (102,31%)
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase penyelesaian masalah pemerintahan umum	-	-	100%	100%	-	-	100% (100%)	100% (100%)
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	-	A	A	A	-	87,19 (A) (96,87%)	86,47 (A) (96,07%)	85,52(A) (100%)

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2024

Sedangkan persentase perbandingan capaian kinerja keuangan masing-masing program Kemantren Gondomanan dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :

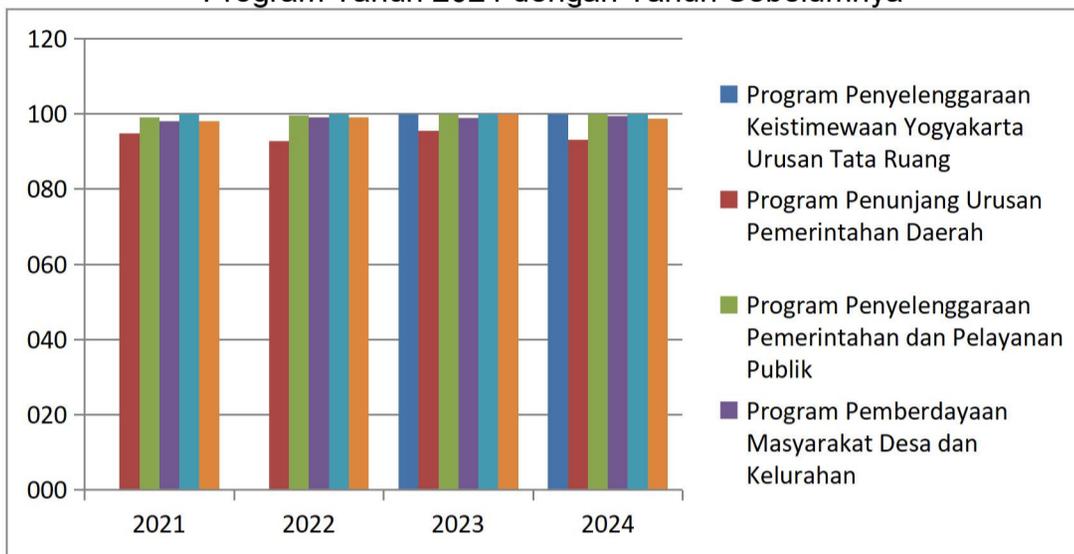
Tabel III.10
Perbandingan Capaian Kinerja Keuangan Program Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Program/Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja (%)			
		2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	-	-	-	99,83 %
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	99,12	99,65	100 %	100 %
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	98,02	99,19	98,97 %	99,47 %
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	99,94	100	100%	100%
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	98,02	99,19	100%	100%
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94,87	92,83	95,48 %	93,09%
					95,39 %

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2024

Gambar 3

Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Keuangan Program Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya



Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2024

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Dalam Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 35 tahun 2022 tentang Renstra tahun 2023-2026 telah dilaksanakan review kedua atas target-target sasaran dan program pada Renstra Kemantren Gondomanan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Nomor 267 Tahun 2024 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya. Berikut Matriks hasil kesepakatan review Target Sasaran dan target Program pada Renstra Kemantren Gondomanan Tahun 2023-2026 yang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel III.11

Matrik Hasil Kesepakatan Review Target Sasaran Pada Renstra
Kemantren Gondomanan Tahun 2023-2026

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Metodologi	Formula Indikator Sasaran	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran			
					2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Perkembangan Pembangunan Kemantren Gondomanan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan dihitung dari Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kelurahan Ngupasan ditambah Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kelurahan Prawirodirjan dibagi 2	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan =Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	367,36 poin	368 poin	369 poin	370 poin	371 poin
			Review 2024	367,36 poin	368 poin	369 poin	385 poin	390 poin
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat		61 poin	62 poin	63 poin	64 poin
			Kesepakatan Review 2023	80 poin	81 poin	81 poin	81 poin	81 poin
			Sumber data :					
			Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	87,19 poin	81 poin	81 poin	81 poin	81 poin

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2024

Selanjutnya Hasil Kesepakatan dalam Review Target Program Pada Renstra Kemantren Gondomanan.

Tabel III.12

Matrik Hasil Kesepakatan Review Target Program Pada Renstra
Kemantren Gondomanan Tahun 2023-2026

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula Indikator Program (Outcome)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program			
				2023	2024	2025	2026
				Target	Target	Target	Target
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondomanan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondomanan total	88.62	88.31 poin	88.41 poin	88.51 poin	88.61 poin
		- Nilai survei kepuasan masyarakat	88.62	88.31 poin	88.41 poin	88.51 poin	88.61 poin
		Kesepakatan Review 2023	88.62 poin	88.62 poin	88.70 poin	88.73 poin	88.75 poin
		Review 2024	88.62 poin	88.62 poin	88.70 poin	88.75 poin	88.80 poin
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	515.392.000 Rupiah	2.256.641.980	2.256.641.980	2.256.641.980	2.256.641.980
		Kesepakatan Review 2023		1,032,240,000	1,043,524,000	1,061,035,000	1,072,776,000
		Review 2024		1,032,240,000	1,044,024,000	1,061,035,000	1,073,276,000
		- Dana Swadaya Murni Masyarakat Total Kel Ngupasan	348,620,000	468,000,000	468,000,000	474,000,000	474,000,000
		Review 2024					
		- Dana Swadaya Murni Masyarakat Kel Ngupasan	348,620,000	468,000,000	468,500,000	474,000,000	474,500,000
		- Dana Swadaya Murni Masyarakat Kel Prawirodirjan	166,772,000	564,240,000	575,524,000	587,035,000	598,776,000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondomanan	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondomanan	152 Pelanggaran	140 Pelanggaran	130 Pelanggaran	120 Pelanggaran	110 Pelanggaran
		Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	152 Pelanggaran	140 Pelanggaran	130 Pelanggaran	120 Pelanggaran	110 Pelanggaran
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase permasalahan Kemantren Gondomanan terselesaikan sebagai hasil	Persentase permasalahan Kemantren Gondomanan terselesaikan sebagai hasil	-	100 %	100 %	100 %	100 %

AN UMUM	koordinasi	koordinasi					
		Jumlah permasalahan Kemantren Gondomanan terselesaikan sebagai hasil koordinasi		100 %	100 %	100 %	100 %
		Jumlah semua permasalahan Kemantren Gondomanan		100 %	100 %	100 %	100 %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	A Nilai				
		Sumber data :					
		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	A Nilai				

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2024

Dalam menilai pencapaian tujuan jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra maka perlu dievaluasi capaian kinerja dari tahun ke tahun apakah sudah selaras dengan target tujuan tersebut.

Tabel III.13
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama dengan Target Akhir Renstra

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran/ Tujuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 ter hadap target 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)
Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	369	369,6	390	94,77%
Meningkatkan Nilai reformasi birokrasi Kemantren Gondomanan	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan	A Nilai	89,76 (A)	A Nilai	100%

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2024

Dari data tersebut diketahui bahwa capaian indikator kinerja utama semakin mendekati target akhir Renstra, Walaupun tidak mudah tetapi seluruh komponen pegawai Kemantren Gondomanan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga diharapkan target akhir Renstra akan dapat dicapai dengan baik tanpa kendala yang berarti.

Selanjutnya capaian indikator kinerja program terhadap target Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.14

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program dengan Target Renstra

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra	Prosentase capaian tahun ini terhadap target akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Pemantaatan Ruang Strategis Sumbu filosofis	2 dok	2 dok	2 dok	100%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	88,70	88,72	88,80	99,91%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat	1.044.024.000	1.049.185.000	1.073.276.000	97,76%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda	130	127	110	84,55%
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase penyelesaian masalah sbg hasil koordinasi	100%	100%	100%	100%
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A Nilai	85,52(A)	A Nilai	100%

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2024

Dari data pada tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja pada sasaran strategis dan semua program di Kemantren Gondomanan masuk kategori Sangat Tinggi dengan prosentase capaian yang sesuai target yang telah ditetapkan. Tentu hal ini tidak terlepas dari peran faktor-faktor yang mendukung kinerja Kemantren Gondomanan tersebut. Meskipun masih ada beberapa faktor penghambat, namun berkat sinergi yang kuat antara Pemerintah, masyarakat dan *stakeholder* serta motivasi dan semangat untuk melayani dengan hati yang terbaik untuk masyarakat, maka hambatan-hambatan yang ada dapat diatasi dan diminimalisir dengan baik.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Organisasi Sejenis

Sebagai bagian dari upaya perbaikan yang terus menerus maka perlu dilakukan perbandingan capaian kinerja dengan capaian instansi/ organisasi sejenis. Kemantren Gondomanan telah melakukan perbandingan capaian kinerja dengan capaian instansi/organisasi sejenis dengan cara melihat data capaian kinerja di data LKIP pada website beberapa Kemantren lain sebagaimana terlihat pada matriks berikut :

Tabel III.15
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Instansi/
Organisasi Sejenis

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Kemantren Tahun 2023 (Target/Realisasi)				Keterangan
		Gondomanan	Ngampilan	Kraton	Pakualaman	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren	368 / 368,3	403 /403	385 / 385,55	407 /407	
2	Nilai Reformasi Birokrasi	A/94,44(AA)	A/A	BB/82,35 (A)	A/73,68 (BB)	
3	Nilai Hasil Survei SKM	88,62 / 88,68	84,40 / 84,40	85,50 / 85,65	82,00/ 85,14	
4	Penurunan Angka Pelanggaran Perda	140 / 136	68 /67	36 / 32	80/80	
5	Angka Swadaya Murni	1.032.240.000 / 1.039.317.000	750.000.000 / 773.290.000	1.024.570.000/ 1.199.241.000	705.000.000 / 1.166.815.000	

Sumber : Analisis Data LKIP 2023 di Website Kemantren Gondomanan, Ngampilan, Kraton dan Pakualaman.

Dari data perbandingan tersebut diatas maka diketahui bahwa penetapan target dari masing-masing Kemantren nilai baseline nya berbeda-beda, namun rata-rata realisasinya tercapai 100% atau lebih. Untuk Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan dapat tercapai lebih baik.

5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Kemantren Gondomanan yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

a. Sasaran Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat

Sasaran strategis tahun 2024 "***Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat***" telah tercapai sesuai target yang ditetapkan, dan berdasarkan capaian pada tahun-tahun sebelumnya maka optimis target akhir Renstra di tahun keempat akan dapat dicapai. Capaian sasaran strategis tahun 2024 ini sebesar 169,6 poin dari target 169 dan mengalami peningkatan 1.30 point dari capaian tahun sebelumnya, demikian juga prosentase capaian kinerjanya juga meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa tetap ada dinamika dan peningkatan dalam komponen-komponen parameter yang menyusun indikator nilai tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meskipun dalam skala yang kecil karena dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2023-2024, diantaranya mulai menggeliatnya aktivasi kegiatan ekonomi masyarakat pasca meredanya pandemi Covid19 serta adanya rangkaian kegiatan pesta demokrasi yang dinikmati dan melibatkan seluruh masyarakat dengan pelaksanaan pemilu nasional untuk memilih presiden/wakil presiden serta DPR/DPRD serta Pilkada yang telah berhasil dilaksanakan secara baik dan lancar pada periode tersebut.

Dari data hasil penilaian tingkat perkembangan pembangunan di level kelurahan maka diketahui bahwa Kelurahan Ngupasan mendapatkan nilai sedikit lebih tinggi (369,8) daripada Kelurahan Prawirodirjan (369,4). Hal ini disebabkan adanya beberapa perkembangan dan dinamika kegiatan sosial ekonomi masyarakat di kelurahan Ngupasan pada tahun 2024 yang dinilai relatif lebih cepat, terutama dengan kondisi Kelurahan Ngupasan berada sebagai bagian sumbu filosofi sehingga memiliki potensi yang lebih untuk berkegiatan ekonomi bagi warganya, adanya aktivitas kegiatan pelestarian seni budaya lokal Ngupasan, adanya penyelenggaraan Festival Apem (tahunan) yang cukup berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, pelestarian kuliner lokal Ngupasan

(kicak) serta adanya penyelenggaraan Festival Budaya Tionghoa secara rutin setiap tahun sehingga dapat mendorong peningkatan kegiatan perekonomian dan sosial budaya masyarakat Kemantren Gondomanan secara umum terutama kelurahan Ngupasan.

Selain itu, capaian target pada program-program yang mendukung sasaran strategis juga telah tercapai sesuai target yang ditetapkan bahkan melebihi target. Hal ini juga menunjukkan trend positif pencapaian kinerja program di tahun-tahun mendatang.

Penjelasan capaian kinerja pada masing-masing indikator program adalah sebagai berikut :

(1) Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Tata Ruang merupakan program baru yang dilaksanakan di 14 Kemantren di Kota Yogyakarta pada tahun 2024 sebagai respon terhadap permasalahan darurat sampah secara umum di Daerah Istimewa Yogyakarta dan terutama di Kota Yogyakarta dengan dialokasikan Dana Keistimewaan yang ditetapkan sebesar Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) untuk setiap kelurahan di masing-masing kemantren se Kota Yogyakarta. Kemantren Gondomanan mendapatkan alokasi Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) untuk 2 (dua) kelurahan dengan indikator Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis dengan target 2 dokumen.

Program ini merupakan serangkaian kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis dengan Keluaran (Output) berupa Pelatihan Pembuatan Kompos melalui Pengolahan Sampah Organik Skala Rumah Tangga dengan Metode Biopori. Pelatihan ini dilaksanakan di kemantren Gondomanan sebagai upaya menghadapi kondisi darurat sampah di Kota Yogyakarta, yang terdiri dari 2 (dua) Tolok Ukur Kinerja dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pelatihan Pembuatan Kompos melalui Pengolahan Sampah Organik Skala Rumah Tangga dengan Metode Biopori di Kelurahan Prawirodirjan; dan
- b. Pelatihan Pembuatan Kompos melalui Pengolahan Sampah Organik Skala Rumah Tangga dengan Metode Biopori di Kelurahan Ngupasan.

Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat dalam mengelola sampah organik menjadi kompos yang berkualitas tinggi. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan kompos tersebut sebagai pupuk organik yang dapat mendukung program kemandirian pangan sekaligus melakukan upaya bersama untuk mengurangi volume timbulan sampah organik.

Adapun dengan dilaksanakannya kegiatan ini, dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah organik secara benar dan efektif;
2. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat dalam pembuatan kompos melalui metode biopori.
3. Meningkatkan ketersediaan pupuk organik berkualitas tinggi untuk digunakan dalam pertanian perkotaan dalam rangka mendukung program ketahanan dan kemandirian pangan di Kota Yogyakarta.
4. Mengurangi jumlah sampah organik yang akhirnya dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Target kegiatan ini dinyatakan dalam angka 2(dua) dokumen laporan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis dan seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar sehingga prosentase capaian kinerja yang diperoleh adalah **100%** dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi**.

(2) Nilai survei kepuasan masyarakat,

Pelaksanaan Pengukuran SKM

Untuk survey pada tahun 2024 ini dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu penilaian SKM untuk bulan Januari s.d Juni dilakukan dengan sistem *cut off* atau melakukan penilaian kepada pengguna layanan yang ada selama bulan Januari s.d Juni 2024 dengan responden yang diperoleh selama enam bulan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi kepuasan layanan kepada masyarakat selama satu semester agar dapat memperbaiki layanan yang kurang pada bulan atau semester berikutnya untuk dapat mencapai target kinerja Kemantren Gondomanan. Hasil penilaian SKM Kemantren Gondomanan selama bulan Januari s.d Juni 2024 dengan responden sebanyak 80 orang sebagai berikut :

Tabel III.16

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Bulan Januari s.d Juni Tahun 2024

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN
1	Persyaratan	3.400
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.650
3	Waktu Penyelesaian	3.425
4	Informasi Pelayanan	3.588
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.400
6	Kompetensi Pelaksana	3.588
7	Perilaku pelaksana	3.588
8	Maklumat	3.613
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3.463
	Nilai Rata-rata	3.488
	Nilai SKM setelah dikonversi	87.21

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2024

Dari tabel nilai SKM diatas dapat dilihat terdapat tiga unsur dengan nilai survey terendah yaitu pada unsur :

1. Persyaratan dengan nilai Unsur 3.400
2. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan unsur 3,400
3. Waktu Penyelesaian nilai unsur 3,425.

Berdasarkan hasil tersebut, upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan unsur nilai dari ketiga unsur tersebut adalah untuk Persyaratan, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan unsur dan Waktu Penyelesaian dilakukan dengan reuiu SOP dan SPP dan Melakukan Forum Konsultasi Publik untuk memperoleh kesepakatan dengan pengguna layanan. Pada SOP pelayanan, untuk pelayanan adminduk disesuaikan dengan sistem JSS yang telah diperbarui. Untuk pelayanan non adminduk SOP disesuaikan dengan sistem, prosedur dan persyaratan sesuai Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kemantren dan Kelurahan Berbasis Elektronik dan Perwal No. 50 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Nonperizinan yang berlaku pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

Tabel III.17

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN
1	Persyaratan	3,520
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,707
3	Waktu Penyelesaian	3,513
4	Informasi Pelayanan	3,640
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,467
6	Kompetensi Pelaksana **)	3,627
7	Perilaku pelaksana **)	3,647
8	Sarana dan Prasarana	3,633
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,507
	Nilai Rata-rata	3,549
	Nilai SKM setelah dikonversi	88,72

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2024

Berdasarkan tabel diatas, Unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan :

1. Produk spesifikasi jenis pelayanan;
2. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2024 ditemukan adanya aspek pelayanan yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu : aspek Sistem, Mekanisme, dan Prosedur dengan nilai 3,707. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah memahami tata cara dan prosedur pelayanan di Kemantren Gondomanan melalui SOP maupun SOP yang sudah dipublikasikan melalui website maupun melalui e-katalog dan sosialisasi secara langsung pada saat pemohon datang ke Kemantren Gondomanan. Terhadap aspek ini maka perlu untuk dipertahankan dan terus ditingkatkan perilaku pelaksana pelayanan yang positif dan produktif dengan cara :

- a. mereviu SOP dan Standar Pelayanan Publik (SPP) Pelayanan masyarakat Kemantren Gondomanan
- b. mengadakan Forum Konsultasi Publik untuk mendapatkan kesepakatan sekaligus sosialisasi tentang SPP kepada Masyarakat
- c. memberikan informasi tentang tata cara dan prosedur layanan melalui website, media sosial dan leaflet.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan unsur yang kategorinya Tidak Baik/Kurang Baik :

- 1) Membuat E- Katalog pada layanan WhatsApp Kemantren Gondomanan sehingga masyarakat dapat melihat produk, spesifikasi, persyaratan dan informasi lainnya mengenai pelayanan pada katalog tersebut, menampilkan pada website Kemantren Gondomanan. Sehingga warga dapat langsung melihat tanpa harus datang langsung ke Kemantren. Bahwa produk pelayanan di Kemantren Sesuai Perwal No. 30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Secara Elektronik;
- 2) Mengarahkan pemohon layanan administrasi kependudukan untuk mengajukan permohonan/ melakukan pengaduan dan lain sebagainya secara online menggunakan JSS (*Jogja Smart Service*);

- 3) Segera merespon dan menindaklanjuti pengaduan serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan laporan yang masuk.
- 4) Melaksanakan reviu SOP dan SPP, mempublikasikan SPP melalui FKP dan SIPPN.

Upaya untuk meningkatkan nilai pada aspek tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. membuat E-Katalog pada layanan *WhatsApp* Kemantren Gondomanan sehingga masyarakat dapat melihat persyaratan pelayanan pada katalog tersebut, menampilkan pada website Kemantren, dan warga dapat langsung melihat tanpa harus datang langsung ke Kemantren.
- b. mengarahkan pemohon layanan administrasi kependudukan untuk mengajukan permohonan secara online menggunakan JSS (Jogja Smart Services); dan
- c. untuk aspek Produk spesifikasi jenis pelayanan, memberikan informasi melalui e-katalog WA Kemantren, bahwa produk pelayanan di Kemantren sesuai Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Secara Elektronik.

Selain mengupayakan berbagai terobosan untuk meningkatkan kualitas layanan tersebut diatas, guna mendapatkan feedback yang lebih cepat dari pengguna layanan dan respon tinggi terhadap adanya aspek layanan yang perlu dibenahi atau diperbaiki maka dilakukan *cut off* survei kepuasan layanan pada pertengahan tahun (akhir Juni 2024). Dengan demikian maka diharapkan jika ditemukan permasalahan layanan akan cepat ditangani tanpa harus menunggu hasil akhir survei.

(3) Angka swadaya masyarakat,

Untuk Angka swadaya masyarakat, dari target Rp 1.044.024.000,- tercapai sebesar Rp 1.049.185.000,- atau prosentase capaian 100,49% dari target yang ditetapkan.

Dari pencermatan laporan diperoleh data bahwa angka swadaya murni di Kelurahan Ngupasan tercapai sebesar Rp468.535.000,- dan di Kelurahan Prawirodirjan tercatat Rp580.650.000,-.

Secara umum terdapat peningkatan angka target dan capaian swadaya masyarakat dari tahun sebelumnya (target se-kemantren tahun 2023 sebesar Rp1.032.240.000 tercapai Rp1.039.317.000,-).

Pencapaian realisasi yang melebihi target itu didukung dengan adanya kesadaran masyarakat yang tinggi pada kedua Kelurahan yang ada di Kemantren Gondomanan (Kelurahan Ngupasan dan Prawirodirjan) untuk kepentingan lingkungannya terutama setelah berakhirnya masa pandemi Covid 19 yang sudah berakhir dan mulai merangsang pertumbuhan ekonomi Masyarakat sehingga bersemangat untuk berbagi dan berswadaya serta meningkatnya kepedulian warga masyarakat untuk membangun wilayahnya. Swadaya murni tersebut tidak hanya pada pembangunan fisik tapi juga pada pemberdayaan masyarakat, ketika pekerjaan fisik yang besar sudah tertanggung APBD maka warga masyarakat mendukung dengan swadaya murni dalam skala kecil sesuai kemampuan masing-masing untuk membangun wilayahnya di masing-masing kelurahan se-Kemantren Gondomanan.

(4) Jumlah pelanggaran Perda

Jumlah pelanggaran Perda mengalami penurunan dari target yang ditetapkan karena seiring dengan target yang akan dicapai pada akhir Renstra sehingga operasi pemantauan wilayah harus lebih diintensipkan sebagai upaya untuk mengurangi adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah.

Persentase pelanggaran terbanyak adalah pedagang kaki lima (PKL) yang tumbuh menjamur terutama pada musim liburan. Tingkat kunjungan wisata yang sangat tinggi di area Kemantren Gondomanan dan Pelanggaran yang paling banyak adalah PKL (PKL di sirip-sirip Malioboro) dan munculnya PKL baru. Karena setiap libur akhir pekan banyak aktivitas wisatawan sehingga mendorong munculnya penyedia jasa layanan penunjang wisata non formal di sepanjang jalan Senopati. Selain itu banyak

pedagang asongan secara *mobile* berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yg lain menjadi lebih sulit dipantau dinamika pergerakannya. Hal ini selain sebagai potensi ekonomi juga menjadi potensi kerawanan sosial dan mengganggu ketertiban sehingga berpotensi menimbulkan banyaknya terjadi masalah pelanggaran perda. Adanya temuan pelanggaran PKL antara lain berjualan di lokasi yang tidak diijinkan untuk berjualan (kawasan pedestrian), tidak menjaga kebersihan, dan tidak menaati protokol kesehatan.

Upaya penegakan Perda yang dilakukan antara lain : merelokasi PKL yang berjualan di kawasan pedestrian Jalan KHA Dahlan, penertiban PKL, dan patroli terpadu bersinergi dengan Forkompim Kemantren Gondomanan (Polsek, Koramil, Puskesmas, BKO, Satuan Linmas, dan Forum Komunitas Alun-alun Utara).

Selain itu potensi permasalahan ketentraman dan ketertiban umum lainnya yang muncul di tahun 2024 adalah adanya pelaksanaan pesta demokrasi pemilu nasional dan Pilkada di tahun 2024 antara lain ada sampah visual (rontek, spanduk) serta pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu 2024 yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Selain itu, pemasangan APK di titik-titik tertentu di Jalan Ireda (sisi utara) dan di area jalan Brigjen Katamso yang berdekatan oleh beberapa kontestan peserta Pemilu juga menimbulkan potensi konflik horisontal antar pendukung calon legislatif/partai politik tertentu, pemasangan reklame/poster/banner yang tidak pada tempatnya, dan pelanggaran PBG.

Terhadap pelanggaran pemasangan APK dalam rangka Pemilu di awal tahun 2024 sampai dengan Pilkada di akhir tahun 2024 mendapatkan tindakan penanganan yang serius oleh petugas keamanan dan Keteriban bersinergi dengan Panwas dan Bawaslu, karena tindakan pencopotan dapat dilakukan apabila sudah mendapat rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta.

(5) Prosentase permasalahan yang terselesaikan sebagai hasil koordinasi

Indikator prosentase permasalahan di bidang pemerintahan umum yang terselesaikan sebagai hasil koordinasi dihitung dengan membandingkan jumlah permasalahan yang ada dengan jumlah permasalahan yang terselesaikan. Dari laporan Jawatan Praja diketahui bahwa semua permasalahan di bidang pemerintahan umum selama tahun 2024 telah dapat diselesaikan sehingga prosentase capaian kinerja program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tahun Anggaran 2024 adalah **100%** dengan kategori capaian kinerja **Sangat Tinggi**. Berdasarkan catatan notulensi rapat koordinasi Forkompimtren Gondomanan, permasalahan yang ditangani melalui koordinasi antara lain adalah sebagai berikut :

Tabel III.18

Permasalahan yang dibahas dalam Rapat Koordinasi
Forkompimtren Gondomanan tahun 2024

No	Permasalahan	Stakeholder yang Terlibat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemasangan APK di Jembatan Surokarsan	<ul style="list-style-type: none"> - Forkompimtren Gondomanan & Mergangsan - Panwascam Gondomanan & Mergangsan - Ka Jawatan Praja dan Ka Jawatan Keamanan - BKO Satpol PP 	Lokus kejadian di perbatasan dan pelaku yang terlibat insiden dari Gondomanan & Mergangsan.
2.	Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Damai dan Rencana pengamanan Logistik Pemilu dan Pilkada 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Forkompimtren Gondomanan - PPK dan PPS se Gondomanan - Panwascam Gondomanan - Ka Jawatan Praja dan Ka Jawatan Keamanan - BKO Satpol PP 	Rapat koordinasi dan keterlibatan dalam kampanye/sosialisasi Pemilu Damai
3.	Penanganan dan pencegahan stunting	<ul style="list-style-type: none"> - Forkompimtren Gondomanan - Petugas PLKB - Lurah Ngupasan dan Prawirodirjan 	Rapat koordinasi dan ekspose peran masing-masing dalam lokakarya stunting
4.	Pengamanan hari-hari besar (Lebaran, Idul Adha dan Nataru), HUT Kota Yk	<ul style="list-style-type: none"> - Forkompimtren Gondomanan - Ka Jawatan Keamanan - BKO Satpol PP 	Rapat koordinasi dan keterlibatan dalam pengamanan

Sumber : Laporan Jawatan Praja Kemantren Gondomanan Tahun 2024

b. Sasaran Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat

Sasaran strategis tahun 2024 “**Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat**” telah tercapai sesuai target

yang ditetapkan, dan berdasarkan capaian pada tahun sebelumnya maka optimis target akhir Renstra di tahun keempat akan dapat dicapai. Selain itu capaian program yang mendukung sasaran strategis ini juga telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Hal ini juga menunjukkan trend positif pencapaian kinerja program di tahun-tahun mendatang. Penjelasan capaian kinerja pada indikator program yang mendukung sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

Capaian Indikator Program : Nilai hasil evaluasi SAKIP tahun 2023 oleh Inspektorat,

Target nilai SAKIP yang ditetapkan adalah A poin dan telah tercapai 85,52(A) atau prosentase capaian 100% jika didasarkan pada nilai yang diperoleh, dengan predikat **Memuaskan**. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Kota Yogyakarta pada Kemantren Gondomanan Tahun 2023 pada 27 Mei tahun 2024, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta adalah sebesar 85,52 dengan predikat "A". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja yang "memuaskan", yaitu instansi pemerintah dan unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Perencanaan Kinerja, dengan bobot sebesar 30% dengan nilai 29,53. Seluruh dokumen perencanaan telah tersedia dengan lengkap, memenuhi standar yang baik dan dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
- b) Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 30% dengan nilai 26,03. Adapun hal-hal yang tidak sesuai dengan kriteria evaluasi yaitu terdapat kegiatan dan sub kegiatan pada TW II yang belum mencapai target TW II tahun 2023, dokumentasi atas keerlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja belum optimal dan Dokumen pengukuran kinerja untuk pejabat struktural belum seluruhnya disusun sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 9 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, rencana Aksi, Pengukuran Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

- c) Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 15% dengan nilai 13,27. Adapun hal-hal yang tidak sesuai dengan kriteria evaluasi yaitu konsistensi penyajian data daam Laporan kinerja belum optimal dan Dokumentasi atas keterlibatan pimpinan dan pegawai dalam penyusunan LKIP belum optimal.
- d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 25% dengan nilai 16,69. Adapun hal-hal yang tidak sesuai dengan kriteria evaluasi yaitu, adanya pengukuran kinerja eselon yang tidak lengkap, dokumentasi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan evaluasi internal yang kurang optimal dan konsistensi penyajian data dalam LKIP yang belum optimal mempengaruhi capaian akuntabilitas kinerja tahun berjalan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan Tidak terdapat kenaikan capaian efektifitas dan efisiensi kinerja program tahun berjalan bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil evaluasi maka Tim Penilai Inspektorat Kota Yogyakarta selanjutnya merekomendasikan sebagai berikut :

- a) Mengupayakan pencapaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan sesuai target setiap triwulan pada tahun berjalan.
- b) Meningkatkan dokumentasi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan evaluasi internal
- c) Menyusun dokumen pengukuran kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku
- d) Mengupayakan peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja program pada tahun berjalan.

Terhadap beberapa rekomendasi tersebut maka Kemantren Gondomanan telah menindaklanjuti sebagaimana mestinya, yang akan diuraikan di dalam tabel Matriks di bawah ini.

Tabel III.19

Matriks Tindak Lanjut Hasil Penilaian Komponen Manajemen Pada Evaluasi Sakip Kemantren Gondomanan Tahun 2023

No.	Komponen	Hasil Evaluasi	Rekomendasi LHE 2023	Tindak Lanjut	Target
1	Perencanaan Kinerja bobot :30 % nilai 29,53	Seluruh dokumen Perencanaan telah tersedia dengan lengkap, memenuhi standar yang baik dan dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	Mengupayakan pencapaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan sesuai target setiap triwulan pada tahun berjalan	Mengupayakan pencapaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan sesuai target setiap triwulan pada tahun berjalan dengan mencermati tatakala dan monitoring evaluasi secara lebih intensif.	12 bulan
2	Pengukuran Kinerja bobot :30 % nilai : 26,03	Kemantren Gondomanan supaya mengupayakan pencapaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan sesuai target setiap triwulan pada tahun berjalan	Meningkatkan dokumentasi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan evaluasi internal	Mendokumentasikan keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan evaluasi internal secara lebih baik , sistematis dan terstruktur dengan melengkapi bukti dukung setiap kegiatan yang dilakukan.	12 bulan
3	Pelaporan Kinerja bobot :15 % nilai : 13,27	-Konsistensi penyajian data dalam laporan belum optimal - dokumentasi atas keterlibatan pimpinan dan pegawai dalam penyusunan LKIP belum optimal	Menyusun dokumen pengukuran kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	Mengupayakan penyusunan dokumen pengukuran kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku.	12 bulan
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal bobot :25 % nilai 16,69	Tidak terdapat kenaikan capaian efektifitas dan efisiensi kinerja program tahun berjalan bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya	Mengupayakan peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja program pada tahun berjalan.	Mengupayakan peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja program pada tahun berjalan dengan mencermati tatakala dan monitoring evaluasi secara lebih intensif.	12 bulan

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2024

6. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan atau Peningkatan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Dari hasil analisis laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Kemantren Gondomanan tahun 2024 dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, maka dapat dinyatakan bahwa Kemantren Gondomanan telah berhasil mencapai target dan tujuan organisasi. Keberhasilan dalam pencapaian target tersebut diatas didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1) Faktor internal

(a) Ketersediaan anggaran yang semakin memadai

Program kerja yang direncanakan dapat terlaksana karena terencana dengan baik termasuk kebutuhan anggarannya. Pembiayaan dan anggaran sudah sesuai pula dengan standarisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

(b) Kualitas dan kompetensi SDM yang makin meningkat

Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (pegawai) perangkat daerah Kemantren Gondomanan memang dapat menjadi kendala bagi kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan program kerja. Namun keterbatasan kuantitas jika didukung dengan peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ternyata mampu menjadi kekuatan potensial dan menghasilkan kinerja optimal. Melalui proses motivasi pembelajaran yang terus menerus maka Kemantren Gondomanan berhasil mengoptimalkan SDM yang dimiliki untuk merealisasikan program kegiatan yang direncanakan dan mencapai target yang ditetapkan.

(c) Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

Perencanaan yang baik akan sangat menentukan keberhasilan kinerja dalam pencapaian target yang ditetapkan. Sedangkan monitoring dan evaluasi merupakan alat bagi pimpinan untuk dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan program kerja dan kendala apa yang dihadapi sehingga segera dapat dicarikan solusi yang tepat.

Guna mengaktifkan masa tahun anggaran untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan maka perencanaan yang telah

disusun dalam bentuk RKA dan DPA SKPD Kemantren Gondomanan kemudian lebih didetailkan lagi. Tatakala kegiatan disusun sampai dengan level hari/tanggal pelaksanaan kegiatan dan target harian, sehingga semakin mempermudah dalam operasionalisasinya. Selain itu, secara simultan juga dilakukan monitoring dan evaluasi sesering mungkin sehingga meminimalisir celah terjadinya kesalahan, keterlambatan, atau penyimpangan. Apabila ditemui permasalahan dan hambatan pun dapat segera teridentifikasi dan dicarikan solusinya, agar tidak mengganggu upaya pencapaian target dan tujuan.

Dalam rangka penguatan sistem monitoring dan evaluasi guna meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan serta responsivitas gender di semua program/kegiatan, maka setiap Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) diharuskan menyusun kerangka acuan kerja (KAK), menyusun *Gender Analysis Pathway/Gender Budget Statement (GAP/GBS)* dan melakukan analisis resiko dalam bentuk dokumen Manajemen Risiko (MR). Selain itu, pada akhir tahun anggaran setiap PPTK diwajibkan menyusun laporan dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu Januari s/d Desember 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dasar penilaian SKP (Sasaran Kerja Pegawai) pegawai yang bersangkutan.

(d) Inovasi Sistem dan Prosedur Pelayanan

Dalam upaya mengakselerasi pelaksanaan program kegiatan dan pencapaian tujuan maka suatu institusi harus terus berupaya mencari celah-celah inovasi yang bisa dilakukan. Selain adanya dorongan dari Pemerintah Kota untuk terus mengembangkan inovasi, inspirasi perubahan demi efisiensi dan terbaik melayani juga harus ditumbuhkan dalam diri setiap individu dalam organisasi.

Beberapa inovasi dan penyederhanaan sistem prosedur pelayanan di Kemantren Gondomanan tahun 2024 antara lain :

- Penyempurnaan Paket Komanan (Paket Komplit Gondomanan)
Paket Komanan yang dilaunching sejak bulan September 2019 dan mendapat sambutan positif, dukungan dan apresiasi dari

segenap warga masyarakat serta pihak-pihak terkait, disempurnakan dengan mengevaluasi dan menyesuaikan SOP paket layanan dengan perubahan regulasi di tingkat yang lebih tinggi, situasi pasca pandemi, dan perkembangan teknologi informasi terkini.

- Sosialisasi SOP pelayanan secara virtual

Untuk merespon keingintahuan masyarakat terhadap informasi prosedur baru pelayanan di masa pandemi, maka dilakukan sosialisasi secara virtual, mengingat kondisi pandemi tidak memungkinkan untuk mengumpulkan warga guna diberikan informasi pelayanan secara langsung. Sosialisasi dilakukan dengan membuat video pendek berdurasi 3-5 menit berisi tentang SOP dan tatacara mengakses layanan. Video kemudian disebarluaskan dengan diunggah ke website dan media sosial Kemantren Gondomanan, serta dishare ke grup-grup *whatsapp* RT/RW dan warga.

- Pendampingan pelayanan

Terhadap warga yang masih belum memahami prosedur pelayanan secara online, atau bagi warga yang memiliki keterbatasan dan kurang memahami penggunaan gadget maka dalam mengakses pelayanan bisa didampingi oleh petugas.

(e) Pemanfaatan teknologi informasi

Perkembangan teknologi informasi yang cukup pesat dirasakan sangat membantu dalam mengakselerasi pencapaian target program dan kegiatan. Melalui aplikasi *Jogja Smart Services (JSS)* yang memuat ratusan macam SIM sangat memudahkan bagi warga masyarakat dan perangkat Kemantren Gondomanan dalam mengakses informasi, memberikan layanan, mengolah data, melakukan monitoring dan evaluasi, menyusun laporan, hingga menyampaikan publikasi sebagai wujud akuntabilitas. Selain itu pemanfaatan berbagai platform media sosial juga mendukung penyebaran informasi dan percepatan koordinasi.

(f) Penerapan *system reward and punishment* untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja pegawai

Dalam rangka mendorong motivasi berkinerja dan semangat berprestasi maka dipandang perlu untuk menerapkan *system reward and punishment*. Bentuknya adalah pemberian reward berupa piagam penghargaan dan hadiah dari pimpinan organisasi (Mantri Pamong Praja) bagi pegawai yang dapat mencapai kinerja yang tinggi, dan hukuman/sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku jika pegawai tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan atau jika terbukti melakukan pelanggaran disiplin.

2) Faktor Eksternal

(a) Peran Lembaga Sosial Kemasyarakatan

Lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di Kemantren Gondomanan mulai dari tingkat terendah (RT, RW, kampung, kelurahan, kemantren) secara aktif dilibatkan dan berperan penting mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, sampai dengan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan. Keterlibatan aktif dan intensif dari lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan ini memberikan dampak positif berupa makin meningkatnya ketepatan perencanaan, ketepatan sasaran, efektivitas, efisiensi dan kualitas kegiatan.

(b) Partisipasi dan Swadaya Masyarakat

Beberapa program yang terkait langsung dengan masyarakat, khususnya program pemberdayaan masyarakat, tentu harus didukung dengan partisipasi masyarakat itu sendiri, baik sebagai subyek maupun sasaran penerima manfaat kegiatan. Bahkan indikator nilai tingkat swadaya masyarakat ini menjadi cerminan tinggi rendahnya tingkat dukungan dan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini bisa diwujudkan dalam beragam bentuk mulai dari kesediaan untuk merubah pola pikir dan budaya yang kurang produktif, peningkatan ketrampilan yang berkontribusi positif terhadap perekonomian, swadaya masyarakat dalam kegiatan dan pembangunan sarana prasarana umum, dan lain sebagainya.

Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan secara lebih inklusif dibangun melalui Musrenbang Tematik, dimana tahapan Musrenbang di tingkat kemantren diformat secara

horizontal dengan membentuk 3 (tiga) klaster, yaitu klaster pembangunan prasarana fisik, klaster kesehatan, perempuan dan anak, dan klaster ekonomi sosial budaya. Melalui sistem klasterisasi tersebut diharapkan pembahasan dan penyusunan rencana jangka pendek menengah dan panjang dari masing-masing klaster dapat lebih fokus, intensif, holistik dan integratif.

7. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Jika dirinci secara detail tidak seluruh kegiatan dapat dikatakan berhasil walaupun capaian kinerja secara keseluruhan masuk kategori Sangat Tinggi. Meskipun demikian deviasi anggaran yang tergolong kecil ini tidak berpengaruh signifikan pada rata-rata umum capaian kinerja.

a. Analisis kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

1) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang

Tercapainya target indikator kinerja program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang yakni terlaksananya serangkaian kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis dengan Keluaran (Output) berupa Pelatihan Pembuatan Kompos melalui Pengolahan Sampah Organik Skala Rumah Tangga dengan Metode Biopori. Pelatihan ini dilaksanakan di kemantren Gondomanan sebagai upaya menghadapi kondisi darurat sampah di Kota Yogyakarta, yang terdiri dari 2 (dua) Tolok Ukur Kinerja dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pelatihan Pembuatan Kompos melalui Pengolahan Sampah Organik Skala Rumah Tangga dengan Metode Biopori di Kelurahan Prawirodirjan; dan
- b. Pelatihan Pembuatan Kompos melalui Pengolahan Sampah Organik Skala Rumah Tangga dengan Metode Biopori di Kelurahan Ngupasan.

Kegiatan ini telah terlaksana dengan lancar dengan adanya partisipasi aktif masyarakat di kedua kelurahan sehingga dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat dalam mengelola sampah organik menjadi kompos yang berkualitas tinggi. Selanjutnya masyarakat dapat memanfaatkan kompos tersebut sebagai pupuk organik yang dapat mendukung program kemandirian pangan sekaligus melakukan upaya bersama untuk mengurangi volume timbunan sampah organik.

Adapun terlaksananya kegiatan ini, telah memberikan beberapa manfaat, antara lain:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah organik secara benar dan efektif;
- b. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat dalam pembuatan kompos melalui metode biopori.
- c. Meningkatkan ketersediaan pupuk organik berkualitas tinggi untuk digunakan dalam pertanian perkotaan dalam rangka mendukung program ketahanan dan kemandirian pangan di Kota Yogyakarta.
- d. Mengurangi jumlah sampah organik yang akhirnya dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan

2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pencapaian target kinerja program, yakni nilai Reformasi Birokrasi dan SAKIP ditunjang oleh beberapa upaya antara lain :

- a) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja secara rutin dan intensif;
- b) Tertib dalam pencatatan dan pendokumentasian kegiatan dan bukti dukung.
- c) Penyampaian laporan dan administrasi kegiatan secara lengkap dan tepat waktu.
- d) Respon dan tindak lanjut cepat dan tepat terhadap rekomendasi hasil evaluasi dan/atau permasalahan yang terjadi.

3) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a) Kegiatan ini sangat menunjang keberhasilan pencapaian target pada pencapaian kinerja karena merupakan pelayanan langsung

kepada warga masyarakat melalui program Paket Komanan (Paket Komplit Gondomanan) yang dulunya dikenal dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan juga didukung oleh kegiatan fasilitasi lainnya baik penyelenggaraan pemerintahan maupun ketentraman dan ketertiban. Kegiatan pelayanan dengan Paket Komanan terus dikembangkan disesuaikan dengan perubahan regulasi pelayanan dan perkembangan teknologi terkini sehingga masyarakat merasa mudah, nyaman dan terlayani dengan ramah oleh petugas.

- b) Gencarnya sosialisasi dan publikasi pelayanan di kecamatan yang dilakukan melalui berbagai media sosial seperti *website*, *facebook*, *instagram*, *youtube* dan buletin Gondoarum menjadikan masyarakat makin memahami dan mendorong untuk makin aktif mengakses berbagai pelayanan dan informasi yang diberikan oleh Kemantren Gondomanan.
- c) Dukungan teknologi informasi berupa aplikasi JSS juga semakin memudahkan sistem prosedur dan konektivitas interface pelayanan Kemantren Gondomanan dengan masyarakat.

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- a) Kegiatan pemberdayaan masyarakat baik fisik maupun non fisik yang dilaksanakan di kemantren maupun kelurahan telah melibatkan masyarakat mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharannya.
- b) Partisipasi, dukungan, keterlibatan dan swadaya masyarakat yang cukup tinggi, sehingga sangat mendukung kelancaran kegiatan.
- c) Adanya inovasi pengembangan penyelenggaraan Festival Apem (tahunan) di Kelurahan Ngupasan yang cukup berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat menjadi tonggak penting untuk mengakselerasi pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat setempat.

b. Analisis kegiatan yang menghambat pencapaian pernyataan kinerja

1) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)

Formasi pegawai Kemantren Gondomanan saat ini baru terpenuhi

78% dari kebutuhan sesuai hasil analisis jabatan, tentu ini belum memadai bagi organisasi Kemantren Gondomanan. Kekurangan personil terutama dirasakan di kelurahan mengingat adanya kebijakan Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat komitmen (PPKom), untuk melaksanakan tugas dan pelimpahan kewenangan yang semakin besar dan kompleks serta alokasi anggaran yang lebih besar kepada kelurahan. Kebijakan ini telah berjalan beberapa tahun namun tidak/belum disertai dengan penambahan personil. Sesuai hasil analisis jabatan, sebagai konsekuensi pengangkatan Lurah sebagai KPA seharusnya didukung tim/pejabat pengelola keuangan dan kegiatan yang memadai, dimana sesuai ketentuan beberapa jabatan harus diisi oleh PNS/ASN. Pada kenyataannya sudah ada penambahan personil di kelurahan namun hanya diperbolehkan mengangkat tenaga teknis melalui belanja jasa orang perseorangan untuk membantu pelayanan dan administrasi umum kegiatan. Upaya lain dilakukan untuk meningkatkan kualitas melalui berbagai bimbingan teknis dan diklat peningkatan kompetensi pegawai. Meskipun demikian, ketika tuntutan beban kerja semakin bertambah maka kemampuan SDM yang ada pun masih dirasa kurang memadai. Selain itu adanya Pejabat Struktural Lurah Prawirodirjan yang pensiun karena meninggal dunia sejak bulan Juni 2024 belum ada penggantinya sampai dengan sekarang. Sehingga adanya pelaksana tugas lurah diperpanjang sampai sekarang mempunyai kewenangan yang kurang leluasa dalam proses pencapaian target kinerja yang telah ditentukan.

2) Kegiatan yang bersifat “penjagaan”

Beberapa kegiatan di program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah khususnya yang bertujuan untuk pemeliharaan dan bersifat penjagaan (misal penggantian suku cadang, pembelian BBM) pada beberapa obyek sulit untuk diprediksi kebutuhannya (kapan perlu ganti suku cadang, penyerapan BBM yang kurang optimal karena mobilitas berkurang, dan sebagainya). Termasuk juga belanja pemakaian listrik/telepon yang tidak bisa tepat sesuai perkiraan dan pagu anggaran yang tersedia. Konsekuensi dari belanja semacam

ini adalah target keuangan tidak bisa tercapai 100% (ada sisa anggaran), meskipun target fisik bisa tercapai 100%.

8. Analisis Program/Kegiatan yang Terkait dengan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Perspektif pengarusutamaan gender menjadi pertimbangan dan harus selalu diintegrasikan dalam kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kemantren tetap responsif dan sensitif terhadap kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok rentan 5 (lima) afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus melibatkan 5 (lima) kelompok afirmatif gender mulai dari proses perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan sebagaimana yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya, sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Kemantren Gondomanan. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja.

Afirmasi gender dalam program/kegiatan diterapkan mulai dari tahapan perencanaan melalui penyusunan dokumen *GAP/GBS (Gender Affirmative Program/Gender Budget Statements)* pada setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

9. Kolaborasi Lintas Sektor yang Mendukung Pencapaian Kinerja

1) Sinergitas antar lembaga dalam Forkompimtren

Forum Komunikasi Pimpinan Kemantren (Forkompimtren) yang terdiri dari Mantri Pamong Praja (selaku koordinator), Kepala Kepolisian

Sektor (Kapolsek), Komandan Rayon Militer (Danramil), Kepala UPT Puskesmas dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dibentuk dalam rangka mengemban misi bersama untuk bersinergi menciptakan masyarakat yang aman damai sejahtera sesuai bidangnya masing-masing. Untuk itu diperlukan mekanisme komunikasi, koordinasi, sinergi dan integrasi yang intensif dan efektif agar tujuan dan kepentingan bersama dapat diwujudkan. Beberapa contoh sinergitas yang telah dibangun antara lain :

- Keterlibatan Forkompimtren dalam program kado 17 GM bagi warga usia 17 tahun saat mengurus KTP diberikan bingkisan yang salahsatunya berisi buletin dengan materi yang disusun oleh tim Forkompimtren sebagai bekal informasi yang lengkap bagi remaja yang memasuki usia 17 tahun;
- keterlibatan UPT Puskesmas Gondomanan dan KUA kemantren Gondomanan dalam beberapa proses/prosedur administrasi kependudukan yang terangkum dalam Paket Komanan;
- Sinergitas Forkompimtren bersama Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Petugas PKB dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam penanganan dan pencegahan kasus stunting, dalam bentuk kegiatan bersama antara lain edukasi kepada masyarakat tentang penanganan dan pencegahan stunting, pemberian bantuan pangan dan gizi, dan keterpaduan gerak dalam kegiatan Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kemantren Gondomanan;
- Sinergitas Forkompimtren dalam pengamanan proses pelaksanaan Pemilu Damai 2024 dan pengamanan perayaan hari-hari besar (Idul Fitri, Idul Adha dan Natal Tahun Baru).
- Sinergitas seluruh jajaran Forkompimtren bersama Tim Penggerak PKK, Bank Sampah dan elemen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan kegiatan Aksi 1124 Gondomanan Bersih untuk Jogja Istimewa;
- Kebersamaan dalam berbagai kegiatan seperti penanganan masalah sosial di wilayah Kemantren Gondomanan, olahraga dan pemantauan wilayah bersama tiap Jumat pagi, dan sebagainya.

2) Sinergitas dalam KOMPAK CODE

KOMPAK CODE (Kolaborasi Mewujudkan Pembangunan Kawasan Bantaran Sungai Code) adalah Inovasi yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan lingkungan yang nyaman huni dan bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat di sekitar Bantaran Sungai Code Kelurahan Prawirodirjan. Inovasi KOMPAK CODE bertujuan untuk menata kawasan kumuh, meningkatkan perekonomian masyarakat, mengurangi risiko bencana, menjadikan kawasan nyaman huni, dan menambah Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) sebagai paru-paru kota. Kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak antara lain : Kelurahan Prawirodirjan, CSR, Lembaga Masyarakat, Dinas PUPKP, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Inovasi KOMPAK CODE dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2022, dan saat ini sudah sampai tahapan selesainya pembangunan prasarana fisik, yang telah dilanjutkan dengan pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan pertanian perkotaan.

B. Realisasi Anggaran

1. Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran Kemantren Gondomanan tahun 2024 sebesar 95,39% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 99,10%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 98,12%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, terdapat 3(tiga) program dengan serapan anggaran mencapai 100% yaitu : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Anggaran dan realisasi belanja yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.20

Anggaran dan Realisasi Belanja Kemantren Gondomanan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Realisasi (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	2 dokumen	2 dokumen	100	200.000.000	199.653.200	99,83
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	88,70	88,72	100,02	29.003.000	29.003.000	100
		Angka Swadaya Masyarakat	1.044.024.000	1.049.185.000	100,49	2.806.221.448	2.791.430.137	99,47
		Jumlah pelanggaran Perda	130	127	102,31	217.360.000	217.360.000	100
		Prosentase permasalahan terselesaikan	100%	100%	100	73.350.000	73.350.000	100
2	Nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai SAKIP oleh Inspektorat	A	85,52(A)	100	1.495.220.690	1.467.094.071	98,12
Jumlah						4.821.155.138	4.777.890.408	99,10
Total Belanja (dengan Belanja Pegawai)						9.354.141.138	8.922.748.436	95,39

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat penyerapan anggaran untuk melaksanakan program-program yang mendukung pencapaian tujuan organisasi sangat tinggi. Meskipun demikian ada beberapa komponen biaya yang memang tidak dapat diserap maksimal (100%) karena efisiensi, dengan tanpa mengurangi kuantitas dan kualitas output yang dihasilkan. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 telah mencukupi.

Selanjutnya, untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja organisasi maka anggaran dan realisasi program-program dirinci lagi per kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini. Dari

tabel tersebut dapat diidentifikasi beberapa kegiatan yang penyerapannya tidak dapat optimal yang akan dianalisis pada sub bab berikutnya.

Tabel III.21

Anggaran dan Realisasi Kegiatan Kemantren Gondomanan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Belanja Non Pegawai	4.821.155.138	4.777.890.408	99,10
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	200.000.000	199.653.200	99,83%
	Kegiatan : Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	200.000.000	199.653.200	99,83%
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	200.000.000	199.653.200	99,83%
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.028.206.690	5.611.952.099	93,09%
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.456.000	54.456.000	100%
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.890.000	2.890.000	100%
	2) Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD	2.975.000	2.975.000	100%
	3) Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.980.000	1.980.000	100%
	4) Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	38.256.000	38.256.000	100%
	5) Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD	2.430.000	2.430.000	100%
	6) Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.980.000	1.980.000	100%
	7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.945.000	3.945.000	100%
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.541.726.000	4.153.598.028	91,45%
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.532.986.000	4.144.858.028	91,44%
	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.380.000	1.380.000	100%
	3) Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.380.000	1.380.000	100%
	4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.380.000	1.380.000	100%
	5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.380.000	1.380.000	100%
	6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.380.000	1.380.000	100%
	7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.840.000	1.840.000	100%
	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	920.000	920.000	100%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	920.000	920.000	100%
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	690.000	690.000	100%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	690.000	690.000	100%
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	170.839.690	170.826.036	99,99%

	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.813.350	3.813.350	100%
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.541.340	45.540.380	100%
	3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.775.000	34.775.000	100%
	4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.710.000	86.697.305	99,99%
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.700.000	76.900.000	89,73%
	1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.700.000	76.900.000	89,73%
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	739.797.000	731.818.074	98,92%
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	100%
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	119.700.000	112.526.474	94,01%
	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	618.597.000	617.791.600	99,87%
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	434.078.000	422.743.962	97,39%
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	71.691.000	69.598.240	97,08
	2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.527.000	12.873.722	62,72%
	3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.060.000	36.060.000	100%
	4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	305.800.000	304.212.000	99,48%
3.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	29.003.000	29.003.000	100%
	Kegiatan : Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	9.900.000	9.900.000	100%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	9.900.000	9.900.000	100%
	Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	19.103.000	19.103.000	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	19.103.000	19.103.000	100%
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.806.221.448	2.791.430.137	99,47%
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	81.192.500	81.192.500	100%
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	81.192.500	81.192.500	100%
	Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.431.773.448	2.416.982.137	99,39%
	1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang di Kelurahan	42.929.772	42.929.772	100%
	2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel. Ngupasan	634.005.500	631.057.849	99,54%
	3) Pembangunan sarana dan Prasarana Kel. Prawirodirjan	401.360.000	398.900.340	99,39%

	4) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prawirodirjan	789.604.000	788.723.000	99,89%
	5) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngupasan	557.944.000	549.441.000	98,48%
	6) Evaluasi Kelurahan	5.930.176	5.930.176	100%
	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kemantren	27.052.000	27.052.000	100%
	1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	20.672.000	20.672.000	100%
	2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6.380.000	6.380.000	100%
	Kegiatan : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	266.203.500	266.203.500	100%
	1) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	29.959.000	29.959.000	100%
	2) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing	56.152.500	56.152.500	100%
	3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingk. Hidup	37.134.000	37.134.000	100%
	4) Pelatihan keluarga Tanggap Bencana Alam	4.460.000	4.460.000	100%
	5) Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	138.498.000	138.498.000	100%
5.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	217.360.000	217.360.000	100%
	Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	217.360.000	217.360.000	100%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	217.360.000	217.360.000	100%
6.	Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	73.350.000	73.350.000	100%
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	73.350.000	73.350.000	100%
	1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	21.320.000	21.320.000	100%
	2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	52.030.000	52.030.000	100%
B.	Belanja Pegawai	4.532.986.000	4.144.858.028	91,44%
	Jumlah	9.354.141.138	8.922.748.436	95,39%

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2024

2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan memperhatikan ketercapaian IKU di atas 100% dan ketercapaian program di atas 100%, serta rata-rata capaian kegiatan di atas 100% menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilakukan sangat

efektif menunjang ketercapaian IKU. Adapun rata-rata capaian realisasi keuangan diatas 95% menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran dan didukung dengan perhitungan yang cermat, karena deviasi tidak lebih dari 10%.

Selain telah terlaksananya program dan kegiatan secara optimal, pada beberapa kegiatan juga telah dilakukan efisiensi sebagai berikut:

Tabel III.22
Data Efisiensi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan
Kemantren Gondomanan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Prosentase
(1)	(2)	(4)	(4)	(5)
A.	Belanja Non Pegawai	4.777.890.408	43.264.730	0,09
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	199.653.200	346.800	0,17%
	Kegiatan : Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	199.653.200	346.800	0,17%
	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	199.653.200	346.800	0,17%
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.611.952.099	416.254.591	6,91%
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.456.000	-	0%
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.890.000	-	0%
	2) Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD	2.975.000	-	0%
	3) Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.980.000	-	0%
	4) Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	38.256.000	-	0%
	5) Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD	2.430.000	-	0%
	6) Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.980.000	-	0%
	7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.945.000	-	0%
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.153.598.028	388.127.972	8,55%
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.144.858.028	388.127.972	8,55%
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.380.000	-	0%
	3. Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.380.000	-	0%
	4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.380.000	-	0%
	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.380.000	-	0%
	6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.380.000	-	0%
	7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.840.000	-	0%
	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	920.000	-	0%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	920.000	-	0%

	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	690.000	-	0%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	690.000	-	0%
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	170.826.036	13.655	0,01%
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.813.350	-	0%
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.540.380	960	0%
	3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.775.000	-	0%
	4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.697.305	12.695	0,01%
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.900.000	8.800.000	10,27%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.900.000	8.800.000	10,27%
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	731.818.074	7.978.926	1,08%
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	-	0%
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	112.526.474	7.173.526	5,99%
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	617.791.600	805.400	0,13%
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	422.743.962	11.334.038	2,61%
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	69.598.240	2.092.760	2,92%
	2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.873.722	7.653.278	37,28%
	3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.060.000	-	0%
	4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	304.212.000	1.588.000	0,52%
3.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	29.003.000	-	0%
	Kegiatan : Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	9.900.000	-	0%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	9.900.000	-	0%
	Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	19.103.000	-	0%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	19.103.000	-	0%
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.791.430.137	14.791.311	0,53%
	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	81.192.500	-	0%
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	81.192.500	-	0%
	Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.416.982.137	-	0,61%
	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	42.929.772	-	0%

	Musrenbang di Kelurahan			
	2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel. Ngupasan	631.057.849	2.947.651	0,46%
	3. Pembangunan sarana dan Prasarana Kel. Prawirodirjan	398.900.340	2.459.660	0,61%
	4. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prawirodirjan	788.723.000	881.000	0,11%
	5. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngupasan	549.441.000	8.503.000	1,52%
	6. Evaluasi Kelurahan	5.930.176	-	0%
	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kemantren	27.052.000	-	0%
	1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	20.672.000	-	0%
	2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6.380.000	-	0%
	Kegiatan : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	266.203.500	-	0%
	1. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	29.959.000	-	0%
	2. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing	56.152.500	-	0%
	3. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingk. Hidup	37.134.000	-	0%
	4. Pelatihan keluarga Tanggap Bencana Alam	4.460.000	-	0%
	5. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	138.498.000	-	0%
5.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	217.360.000	-	0%
	Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	217.360.000	-	0%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	217.360.000	-	0%
6.	Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	73.350.000	-	0%
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	73.350.000	-	0%
	1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	21.320.000	-	0%
	2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	52.030.000	-	0%
B.	Belanja Pegawai	4.144.858.028	388.127.972	0,56%
	Jumlah	8.922.748.436	431.392.702	4,61%

Sumber : Sekretariat Kemantren Gondomanan, 2024

Data efisiensi dalam hal ini merupakan data anggaran yang tidak dapat dilaksanakan/direalisasikan dikarenakan sebab-sebab eksternal maupun internal. Selain itu dapat dijelaskan pula penyebab tidak

terserapnya anggaran untuk program/kegiatan tersebut. Meskipun demikian, inefisiensi tersebut nilainya cukup kecil sehingga tidak mengganggu tingkat pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu perlu diidentifikasi pada pos anggaran dan kode rekening mana saja yang masih rendah capaiannya, untuk diantisipasi agar program/kegiatan dapat direalisasikan secara lebih efisien dan efektif.

Hasil identifikasi menunjukkan efisiensi yang cukup besar terjadi pada program-program :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, serapan terendah sebesar 95,48% pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, hal ini disebabkan karena penentuan anggaran dari BPKAD sedangkan realisasi sesuai dengan kondisi pegawai di SKPD dan perhitungan bulanan dari BPKAD .
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdapat efisiensi pada sub-sub anggaran kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang berupa paket kegiatan pembangunan fisik karena komponen-komponen biayanya menyesuaikan fluktuasi harga pasar, hasil negosiasi, dan tingkat ketepatan perencanaan dengan kondisi yang ada di lapangan.

C. Inovasi dan Prestasi

1. Inovasi yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2023 Kemantren Gondomanan telah melakukan beberapa inovasi baik yang berupa inovasi baru maupun keberlanjutan dari inovasi yang telah berjalan sejak tahun-tahun sebelumnya antara lain sebagai berikut:

- a. Inovasi Paket Pelayanan Komanan

Inovasi ini telah berjalan sejak tahun 2020 namun masih dirasakan manfaatnya sehingga terus dikembangkan disesuaikan dengan tuntutan perubahan dan kebutuhan masyarakat. Inovasi ini juga

sangat menunjang keberhasilan pencapaian target pada pernyataan kinerja oleh karena merupakan pelayanan langsung kepada warga masyarakat melalui program Paket Komanan (Paket Komplit Gondomanan) yang dulunya dikenal dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan juga didukung oleh kegiatan fasilitasi lainnya baik penyelenggaraan pemerintahan maupun ketentraman dan ketertiban.

Pelaksanaan Paket Komanan (Paket Komplit Gondomanan) yang dulunya dikenal dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dilakukan sesuai dengan aturan yang ada terkait pelayanan dengan maksud agar masyarakat merasa mudah, nyaman dan terlayani dengan ramah oleh petugas.

b. Sosialisasi Pelayanan secara Virtual

Berupa pembuatan video pendek tentang sistem prosedur dan tatacara mengakses pelayanan, yang kemudian dipublikasikan melalui website, media sosial dan grup *Whatsapp* warga agar semua lapisan masyarakat semakin memahami dan semakin mudah dalam mengakses layanan.

c. Pendampingan Layanan

Pendampingan oleh petugas diberikan kepada warga yang memiliki keterbatasan kemampuan mengakses teknologi informasi yang dibutuhkan untuk mendukung layanan. Beberapa warga berusia lanjut, difabel atau keluarga miskin kemungkinan menghadapi masalah dalam mengakses layanan berbasis online, sehingga perlu difasilitasi dan didampingi.

d. Inovasi Gondomanan Bersih Untuk Jogja Istimewa

Kegiatan Gondomanan Bersih untuk Jogja Istimewa adalah gerakan kerja bakti massal untuk menjaga lingkungan dengan melibatkan segenap stakeholders yang bersinergi secara harmonis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan partisipasi segenap stakeholders dalam menjaga dan mengelola kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Inovasi ini sudah berjalan beberapa tahun dan hasil nyata dari inovasi ini adalah Kemantren Gondomanan beberapa kali meraih predikat Kecamatan Adipura.

e. KOMPAK CODE (Kolaborasi Mewujudkan Pembangunan Kawasan Bantaran Sungai Code)

KOMPAK CODE adalah Inovasi yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan lingkungan yang nyaman huni dan bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat di sekitar Bantaran Sungai Code Kelurahan Prawirodirjan. Inovasi ini dilatarbelakangi kondisi wilayah Bantaran Sungai Code wilayah Kampung Prawirodirjan yang memiliki karakteristik padat hunian, keterbatasan akses transportasi dan kumuh. Dalam penilaian risiko bencana di bantaran sungai code, terdapat beberapa bencana yang utama antara lain banjir, kebakaran, angin puting beliung dan gempa bumi. Secara sosial ekonomi, masyarakat di wilayah ini rata-rata berpenghasilan menengah ke bawah dengan mata pencaharian warung, jajan pasar, srabutan.

Inovasi KOMPAK CODE bertujuan untuk : menata kawasan kumuh, meningkatkan perekonomian masyarakat, mengurangi risiko bencana, menjadikan kawasan nyaman huni, dan menambah Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) sebagai paru-paru kota. Kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak antara lain : Kelurahan Prawirodirjan, CSR, Lembaga Masyarakat, Dinas PUPKP, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Inovasi KOMPAK CODE dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2022, dan saat ini sudah sampai tahapan selesainya pembangunan prasarana fisik, yang akan dilanjutkan dengan pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan pertanian perkotaan.

f. MAS JAKA PRAWIRO

Inovasi MAS JAKA PRAWIRO adalah program optimalisasi jalur evakuasi/inspeksi di pinggir Kali Code RW 14 dan RW 15 Kelurahan Prawirodirjan Kemantren Gondomanan. Inovasi ini merupakan bagian dari kerangka KOMPAK CODE dengan fokus pengembangan jalur inspeksi sepanjang bantaran Sungai Code yang lebih tertata, aksesible, sekaligus berfungsi optimal sebagai jalur untuk memantau aliran sungai dan mengurangi risiko bencana yang sewaktu-waktu mengancam kawasan tersebut.

g. DASI BUKEMAN

Inovasi DASI BUKEMAN (Digitalisasi Arsip Sub Bagian Umum dan Kepegawaian) adalah upaya untuk mengelola dan menyimpan dokumen/data umum kepegawaian secara lebih aman, tertib dan teratur melalui proses digitalisasi. Sebagaimana diketahui, data dan dokumen umum kepegawaian sangat penting untuk keberlangsungan organisasi dan karir pegawai. Inovasi ini bertujuan untuk mempermudah pencarian data/dokumen apabila sewaktu-waktu dibutuhkan, menghemat tempat penyimpanan, dan mengamankan dokumen agar tidak mudah rusak/hilang. Untuk tahap awal dokumen yang didigitalisasikan adalah dokumen kepegawaian, berita acara rekonsiliasi barang/aset, dan asli/salinan surat keputusan Mantri Pamong Praja. Tahap selanjutnya diupayakan dokumen keuangan dan dokumen lainnya juga akan didigitalisasi dan disimpan dalam google drive.

h. Festival Apem (Tahunan)

Festival Apem merupakan rangkaian kegiatan yang diadakan sejak tahun 2022, atas inisiasi Kampung Ratmakan di Kelurahan Ngupasan. Masyarakat setiap tahun membuat apem pada bulan *ruwah* sebagai bentuk pelestarian budaya dan adat. Untuk teknis acara warga membuat apem bersama lalu disusun dalam gunungan, kemudian dilakukan kirab dan doa bersama, lalu dibagikan ke seluruh warga yg datang menghadiri acara Festival Apem ini. Dalam acara festival apem ini ada pentas seni budaya yg menampilkan potensi kesenian yang ada di Kampung Ratmakan. Untuk tahun 2025 ini akan diperluas dengan mengajak seluruh kampung yang ada di Kelurahan Ngupasan agar bisa menampilkan kekhasan yang ada di kampung masing-masing. Kegiatan penyelenggaraan Festival Apem (tahunan) ini cukup berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, Apalagi dilaksanakan secara rutin setiap tahun sehingga dapat mendorong peningkatan kegiatan perekonomian dan sosial budaya masyarakat terutama kelurahan Ngupasan.

2. Prestasi

Kemantren Gondomanan selama kurun waktu tahun 2023 telah menorehkan beberapa prestasi sebagai berikut :

- a. Kemantren Gondomanan meraih Predikat Perangkat Daerah “memuaskan” dengan nilai Akuntabilitas Kinerja A dengan nilai SAKIP 85,52 pada bulan Mei 2024.
- b. Kelurahan Prawirodirjan Kemantren Gondomanan menjadi finalis Kampung Harmoni Tingkat Kota Yogyakarta.
- c. Kelurahan Prawirodirjan meraih juara I Bangga Kencana Tingkat Kota tahun 2024 kategori KB Pria tahun 2024
- d. Kelurahan Prawirodirjan meraih juara I Bangga Kencana Tingkat Kota tahun 2024 kategori PIK-R tahun 2024
- e. Kelurahan Prawirodirjan Juara III sebagai Lomba Duta Lansia Tingkat DIY tahun 2024
- f. Kampung Sayidan Kelurahan Prawirodirjan Juara I sebagai Mas Kampung Wisata Tingkat Kota Yogyakarta tahun 2024
- g. Tim Bina Keluarga Lansia Kelurahan Prawirodirjan sebagai Juara III Lomba Bina keluarga Lansia Tingkat DIY tahun 2024
- h. Kemantren Gondomanan sebagai Juara III Lomba membuat Menu Bekal Anak Sekolah B2SA tingkat Kota Yogyakarta tahun 2024.
- i. Kelurahan Prawirodirjan sebagai juara Harapan I pada Lomba Kelurahan Rukun Beragama tingkat Kota Yogyakarta tahun 2024.
- j. PORKOT Kategori Putra Kemantren Gondomanan meraih juara I Lomba Atletik Lari 100 meter tingkat Kota Yogyakarta tahun 2024
- k. PORKOT Kategori Putra Kemantren Gondomanan meraih juara II Tenis Meja Beregu tingkat Kota Yogyakarta tahun 2024
- l. PORKOT Kategori Putra Kemantren Gondomanan meraih juara II Lomba Catur tingkat Kota Yogyakarta tahun 2024
- m. Kontingen Barongsai Kelurahan Ngupasan terpilih mewakili Provinsi DIY sebagai Penampil pada Acara Pembukaan PON di Aceh tahun 2024.
- n. Kemantren Gondomanan meraih Peringkat I kategori Kemantren dalam Pemilihan Gender Champion Tingkat Kota Yogyakarta tahun 2024.
- o. Kafilah Kemantren Gondomanan meraih Juara Umum Lomba MTQ Tingkat Kota Yogyakarta pada tahun 2024.

Kafilah Gondomanan Juara Satu

1. Cabang Tilawah Anak putra dan Putri
2. Cabang 1 juz dan Tilawah putra
3. Cabang 20 juz putra dan Putri
4. Cabang 30 juz Putra
5. Cabang Tafsir bahasa Arab putra dan Putri
6. Cabang Hafalan 10 Hadis dengan Sanad
7. Cabang Hafalan 500 Hadis tanpa Sanad Putri

Kafilah Gondomanan Juara Dua

1. Cabang Tilawah Dewasa Putra dan Putri
2. Cabang 1 juz dan Tilawah
3. Cabang 30 Juz Putri
4. Cabang Hafalan 100 Hadits dengan Sanad
5. Cabang Hafalan 500 Hads tanpa Sanad

D. Tindak Lanjut Rekomendasi LKIP Tahun 2023

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Inspektorat Kota Yogyakarta dengan nomor : 700.1.2.1/127/E.AKIP/B/2024 tertanggal 27 Mei 2024, nilai AKIP yang diperoleh Kemantren Gondomanan untuk tahun 2023 adalah sebesar **85,52** atau berada pada predikat **A (memuaskan)**.

Dari hasil penilaian terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2023 ada beberapa catatan dan rekomendasi terhadap LKIP Kemantren Gondomanan yang kemudian menjadi komitmen seluruh entitas organisasi Kemantren Gondomanan untuk menindaklanjutinya. Komitmen ini merupakan upaya terus menerus yang dilakukan untuk menuju keadaan dan mencapai kinerja yang lebih baik lagi.

Tindaklanjut rekomendasi terhadap LKIP tahun 2023 dilaksanakan sejak diterimanya hasil penilaian LKIP oleh Inspektorat. Mantri Pamong Praja segera mengadakan rapat koordinasi untuk menyusun langkah-langkah tindak lanjut yang harus dilakukan. Dengan demikian potensi kesalahan dan keterlambatan dapat segera diminimalkan bahkan ditiadakan.

Tabel III.23

Rekomendasi Inspektorat terhadap LKIP 2023 dan Tindaklanjutnya

No.	Komponen	Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Tindaklanjut	Bukti Dukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan Kinerja bobot :30% nilai 29,53	Seluruh dokumen Perencanaan telah tersedia dengan lengkap, memenuhi standar yang baik dan dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	Mengupayakan pencapaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan sesuai target setiap triwulan pada tahun berjalan	Mengupayakan pencapaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan sesuai target setiap triwulan pada tahun berjalan dengan mencermati tatakala dan monitoring evaluasi secara lebih intensif.	1. BA Desk Timbal balik setiap Triwulan 2. Notulensi rapat-rapat
2	Pengukuran Kinerja bobot :30% nilai : 26,03	-Konsistensi penyajian data dalam laporan belum optimal - dokumentasi atas keterlibatan pimpinan dan pegawai dalam penyusunan LKIP belum optimal	Meningkatkan dokumentasi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan evaluasi internal	Mendokumentasikan keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan evaluasi internal secara lebih baik , sistematis dan terstruktur dengan melengkapi bukti dukung setiap kegiatan yang dilakukan.	1. Notulensi rapat-rapat
3	Pelaporan Kinerja bobot :15% nilai : 13,27	Kemantren Gondomanan supaya mengupayakan pencapaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan sesuai target setiap triwulan pada tahun berjalan	Menyusun dokumen pengukuran kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku	Mengupayakan penyusunan dokumen pengukuran kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku.	Dokumen Pengukuran Kinerja triwulanan semua pejabat struktural
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal bobot :25% nilai 16,69	Tidak terdapat kenaikan capaian efektifitas dan efisiensi kinerja program tahun berjalan bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya	Mengupayakan peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja program pada tahun berjalan.	Mengupayakan peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja program pada tahun berjalan dengan mencermati tatakala dan monitoring evaluasi secara lebih intensif.	1. Laporan Realisasi Fisik dan keuangan per bulan 2. Notulensi rapat-rapat

Sumber : Matriks Tindak Lanjut LHE SAKIP 2023.

Berdasarkan hasil evaluasi maka Tim Penilai Inspektorat Kota Yogyakarta selanjutnya merekomendasikan sebagai berikut :

- e) Mengupayakan pencapaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan sesuai target setiap triwulan pada tahun berjalan.
- f) Meningkatkan dokumentasi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan evaluasi internal
- g) Menyusun dokumen pengukuran kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku
- h) Mengupayakan peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja program pada tahun berjalan.

Tindak lanjut yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a) Mengupayakan pencapaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan sesuai target setiap triwulan pada tahun berjalan dengan mencermati tatakala dan monitoring evaluasi secara lebih intensif.
- b) Mendokumentasikan keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan evaluasi internal secara lebih baik , sistematis dan terstruktur dengan melengkapi bukti dukung setiap kegiatan yang dilakukan.
- c) Mengupayakan penyusunan dokumen pengukuran kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku.
- d) Mengupayakan peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja program pada tahun berjalan dengan mencermati tatakala dan monitoring evaluasi secara lebih intensif.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis dalam tahun 2024 sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja Kemantren Gondomanan telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Baik pada indikator sasaran maupun pada indikator kinerja program keduanya menunjukkan pencapaian target yang sangat baik. Pelaksanaan Program, kegiatan dan pemanfaatan anggaran pada Tahun 2024 sangat efektif dan efisien dalam rangka mendukung capaian IKU. Hal itu menunjukkan segala upaya yang dilakukan Kemantren Gondomanan secara umum dapat dikatakan berhasil dalam mencapai target.

Pelaksanaan kinerja Kemantren Gondomanan yang dilaksanakan oleh jajaran aparatur kemantren tidak lepas dari sinergitas antara masyarakat, *stakeholders* se-Kemantren Gondomanan, Kelurahan Ngupasan, Kelurahan Prawirodirjan, dan OPD Pemerintah Kota Yogyakarta yang terkait langsung dengan kinerja Kemantren Gondomanan. Untuk itu koordinasi antar lini harus terus ditingkatkan sehingga hasil pencapaian tujuan dan kinerja organisasi pada tahun yang akan datang akan semakin baik.

B. Rencana Tindak Lanjut

Dengan memperhatikan paparan data dalam laporan ini dimulai dari Bab I sampai dengan Bab III akan dapat diambil beberapa kesimpulan yang menjadikan catatan untuk peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kemantren Gondomanan pada tahun-tahun yang akan datang. Disamping itu, beberapa rekomendasi terhadap laporan LKIP tahun sebelumnya (2023) juga menjadi perhatian dalam menentukan tindaklanjut untuk upaya perbaikan. Selanjutnya Laporan Kinerja Kemantren Gondomanan Tahun 2024 ini akan dimanfaatkan oleh pimpinan Perangkat Daerah sebagai umpan balik dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja ke depan.

Melihat keberhasilan secara umum capaian kinerja Kemantren Gondomanan dan juga melihat beberapa faktor pendukung dan adanya catatan kecil hambatan dalam pelaksanaan kinerjanya, maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan sebagai berikut:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kemantren Gondomanan Tahun 2024

1. Melakukan upaya pencapaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan sesuai target setiap triwulan pada tahun 2024
2. Melaksanakan upaya peningkatan dokumentasi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan evaluasi internal
3. Menyusun dokumentasi pengukuran kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku
4. Mengupayakan peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja program pada tahun 2024
5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan simultan sebagai upaya untukantisipasi dan pemecahan masalah atau hambatan yang dapat mempengaruhi jalannya kinerja instansi.
6. Memperkuat koordinasi, sinergi dan komunikasi internal dan eksternal sehingga terjadi kesamaan persepsi dan gerak dalam menjalankan visi dan misi instansi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta, semoga dapat memberikan gambaran yang memadai tentang Kinerja Kemantren Gondomanan Tahun Anggaran 2024 dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Struktur Organisasi Kemantren Gondomanan
Lampiran 2	Perencanaan Strategis (Matriks RPD)
Lampiran 3	Berita Acara Review Renstra Tahun 2023-2026
Lampiran 4	Pohon Kinerja Kemantren Gondomanan
Lampiran 5	Matriks Cascading Kemantren Gondomanan_RPD Tahun 2024
Lampiran 6	Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Lampiran 7	Rencana Aksi Kemantren Gondomanan Tahun 2024
Lampiran 8	Tabel I.8 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kemantren Gondomanan Tahun 2024
Lampiran 9	Daftar Nominatif Pegawai Kemantren Gondomanan Tahun 2024
Lampiran 10	Metadata RPD Kemantren 2023-2026
Lampiran 11	Tabel I.7 Data Sarana dan Prasarana Kemantren Gondomanan
Lampiran 12	Laporan Realisasi fisik dan Keuangan kemantren Gondomanan
Lampiran 13	Berita Acara Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kelurahan se Kemantren Gondomanan Tahun 2024
Lampiran 14	Rekapitulasi Laporan Swadaya Murni Kelurahan Tahun 2024
Lampiran 15	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Lampiran 16	Berita Acara Forum OPD Kemantren Gondomanan untuk Renja 2024
Lampiran 17	Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi
Lampiran 18	LHE AKIP Internal 2023
Lampiran 19	SK Tim Penyusunan LAKIP 2024
Lampiran 20	Matriks Tindak Lanjut Evaluasi LHE SAKIP Tahun 2023

- Lampiran 21 Rekapitulasi Realisasi Program Kegiatan tahun 2024
- Lampiran 22 SK Pembentukan Tim Kerja kemantren Gondomanan Tahun 2024
- Lampiran 23 Berita Acara Forum OPD Kemantren Gondomanan Tahun 2024
- Lampiran 24 SK pemberian Piagam Penghargaan untuk Pegawai berprestasi
- Lampiran 25 Berita Acara Desk Realisasi Renja Tribulanan Tahun 2024
- Lampiran 26 Matrik Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024
- Lampiran 27 Notulensi Rapat-rapat tahun 2024
- Lampiran 28 Laporan Penegakan Perda tahun 2024